KAIDAH-KAIDAH PENYELAMATAN NKRI DARI KEHANCURAN

SOLIHIN GP

KULIAH UMUM
PADA ULANG TAHUN KE-80
DI
UNIVERSITAS PADJADJARAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG, 22 JULI 2006

KATA PENGANTAR

No forest, no water, no future, leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak. Itulah ungkapan yang selalu disampaikan oleh Bapak Solihin GP pada setiap pertemuan, baik formal maupun informal. Luasan hutan yang menurun drastis, alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan non lindung, lahan kritis yang semakin luas dari waktu ke waktu telah membuat prihatin Bapak Solihin GP yang saat ini menginjak usia 80 tahun.

Dalam usianya yang telah lanjut tersebut, beliau masih tetap aktif turun ke lapangan berdialog dengan rakyat, mendorong rakyat untuk mampu memulihkan lingkungan dan menghidupkan ekonomi pedesaan berbasis kearifan lokal. Beliau berpendapat, bahwa negara akan kuat bila desa kuat.

Secara pribadi saya sangat mengenal beliau, semenjak beliau masih muda hingga saat sekarang. Seorang tokoh yang sangat energik, bersih, sederhana, berkemauan keras dan konsisten pada cita-cita dalam membela rakyat jelata. Beliau selalu mengatakan bahwa bila terjadi suatu masalah, jangan rakyatnya yang disalahkan, karena pemimpinnyalah yang pasti berbuat kesalahan.

Sebagai Pejoang ‘45 dan saat ini sebagai Pejoang Lingkungan, banyak sekali pengalaman beliau yang sangat berharga untuk kita semua, terutama generasi muda, sebagai bekal dan pegangan dalam meneruskan kehidupan bernegara dan berbangsa yang bermartabat.

Seluruh sivitas akademika Universitas Padjadjaran merasa terhormat dapat ikut merayakan ulang tahun beliau yang ke-80, apalagi dalam kesempatan ini beliau berkenan memberikan kuliah umum mengenai kaidah-kaidah penyelamatan NKRI dari kehancuran, yang antara lain membahas keharusan memulihkan lingkungan, mengangkat derajat rakyat menuju kemandirian bangsa, memberantas budaya konsumtif dan KKN, serta menegakkan kepemimpinan nasional yang diharapkan.

Akhirul kata, sebagai pribadi dan atas nama seluruh sivitas akademika Universitas Padjadjaran, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Solihin GP atas sumbangan pemikirannya untuk Universitas Padjadjaran pada khususnya, dan untuk generasi muda pada umumnya.

Selamat ulang tahun yang ke-80, semoga Allah SWT selalu memberi berkah kepada Bapak Solihin GP dan keluarga, dan semoga pula sumbangan-sumbangan pemikirannya akan menjadi inspirasi serta suri tauladan bagi kita semua. Amiin.

Bandung, 21 Juli 2006

Rektor,

Prof. H.A. Himendra Wargahadibrata

RINGKASAN

Kerusakan lingkungan di Indonesia telah melampaui batas. Pengelolaan sumber daya alam sebagai modal bangsa tidak diselenggarakan menurut azas konservasi. Dari tahun ke tahun kawasan lindung menyusut drastis beralih fungsi menjadi kawasan budidaya yang tidak berkelanjutan seperti permukiman, industri dan pertambangan yang tidak berwawasan lingkungan. Bencana lingkungan dan bencana alam pun silih berganti sepanjang tahun menjadi bencana rutin yang semakin menyengsarakan rakyat.

Pemulihan kawasan lindung berbasis masyarakat dengan paket-paket usaha pedesaan yang berbasis kearifan lokal sebagai "back to basic" diharapkan dapat memulihkan kembali lingkungan hidup dan meningkatkan ekonomi kerakyatan di pedesaan. Pembangunan agroforest atau wanatani dan konsep menanam padi secara seksama cara "system of rice intensification" dengan menggunakan kompos organik dalam olah lahannya diharapkan akan mengurangi ancaman bencana alam dan akan bermuara kepada swadesi, swadaya dan swasembada pangan. Desa kuat maka negara akan kuat.

Di lain pihak, kebijakan-kebijakan kepemerintahan yang dilakukan selama ini telah berdampak kepada perkembangan ekonomi bangsa yang memprihatinkan. Perilaku masyarakat Indonesia pun cenderung semakin konsumtif. Korupsi dan KKN masih tetap merajalela bahkan telah mampu mengangkat negara Indonesia

menjadi salah satu negara yang terpuruk dan paling korup di dunia. Untuk kembali mengangkat derajat bangsa dan negara Indonesia menjadi bermartabat, tiada lain adalah memberantas korupsi dan KKN sebagai prioritas, hindari hutang, laksanakan swadaya dan swadesi dengan menghidupkan kembali perekonomian rakyat. Untuk memberantas korupsi dan KKN diperlukan "pressure" dari segenap lapisan masyarakat yang bersatu dalam satu "platform" dan bersinergi mendorong pemerintah agar memiliki kemauan dan keberanian politik.

Selama merdeka lebih dari 60 tahun ini, rakyat Indonesia semakin jauh dari kesejahteraan dan kebahagiaan. Konflik dan ancaman disintegrasi masih saja muncul, semangat kebersamaan dan gotong royong luntur. Diperlukan pemimpin bangsa yang berkualitas dan mampu sebagai panutan, mampu mengajak kembali rakyat untuk menjalankan Pancasila dan UUD '45 secara konsekwen untuk mempertahan NKRI demi kesejahteraan seluruh rakyat. Pemimpin bangsa harus mampu mengajak seluruh rakyat untuk memenuhi hak dan kewajibannya dalam membela negara dan membela tanah air. Konsep tentara rakyat adalah konsep bela negara yang masih relevan hinga saat ini. Selain itu, pemimpin bangsa harus pula memiliki kriteria berkualitas, tidak mengecewakan rakyat, bergaya hidup sederhana dan memiliki konsep kemandirian anggaran, tidak berhutang kesana-kemari.

DAFTAR ISI

1

PENDAHULUAN

Sebelumnya, marilah kita bersyukur ke hadirat Allah SWT, bahwa kita masih diberi kesempatan untuk menikmati kehidupan di muka bumi ini. Semoga sisa hidup yang diberikan oleh Allah SWT ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya demi bangsa dan negara NKRI, kita abdikan segala kekuatan dan kemampuan secara habis-habisan untuk mengangkat wibawa bangsa dari keterpurukan dan kehancuran.

Dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya dan keluarga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor dan seluruh sivitas akademika Universitas Padjadjaran yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pertemuan dalam rangka memperingati ulang tahun saya yang ke-80. Semoga Allah SWT dapat memberikan pahala dan berkah kepada seluruh sivitas akademika Universitas Padjadjaran. Amiin.

Usia sampai 80 tahun adalah anugerah dari Allah SWT, tetapi dibalik itu saya sebagai manusia harus pula mempertanggungjawabkan kepada-Nya apa yang telah saya perbuat selama hidup di dunia yang fana.

Sebagai pejoang ’45, saya merasa sangat prihatin, bahwa selama 60 tahun lebih Indonesia merdeka, rakyat Indonesia semakin jauh dari kesejahteraan. Padahal kemerdekaan Indonesia telah diperoleh dengan cucuran darah dan air mata. Saya menilai bahwa perjuangan merebut kemerdekaan adalah perjuangan yang sangat hebat. Tetapi kondisi saat ini jauh dari yang dicita-citakan oleh para pejoang kemerdekaan, cara mengisi kemerdekaan tidak sehebat sewaktu merebut kemerdekaan. Bila kondisi terus seperti sekarang, dapat dipastikan masa depan bangsa dan negara Indonesia akan lebih jatuh terpuruk, jauh dari bayangan kehebatan yang dicita-citakan.

Pengalaman yang baik maupun yang tidak baik adalah guru agar kita semua, terutama generasi penerus dapat mengambil hikmah dan manfaat demi kehidupan yang lebih sejahtera di masa depan. Pada kesempatan ini, saya mencoba menyampaikan kuliah umum dengan judul yang saya sendiri menganggap terlalu berat, yaitu *Kaidah-kaidah Penyelamatan NKRI dari Kehancuran*. Sistematika uraian mungkin tidak runut, karena saya bukan peneliti atau akademisi, tetapi sekadar seorang prajurit pejoang ‘45 yang konsisten menginginkan negara dan bangsa ini berjaya dengan rakyatnya yang sejahtera.

Uraian akan saya awali dengan menyampaikan kondisi lingkungan hidup Indonesia yang semakin rusak dan mengakibatkan bencana rutin yang menyengsarakan rakyat. Kondisi lingkungan ini hanya bisa dipulihkan bila rakyat diikutkan aktif secara kesemestaan.

Kemudian saya akan mencoba menguraikan tentang *"back to basic"* membangun pedesaan dan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal. Kita harus yakini bahwa bila desa kuat maka negara akan kuat. Untuk itu paket-paket usaha memberdayakan rakyat pedesaan harus disiapkan sesuai kepentingan rakyat, termasuk bimbingan serta monitoringnya.

Berikutnya adalah uraian tentang keterpurukan ekonomi bangsa Indonesia karena korupsi dan KKN yang telah membudaya, yang hanya bisa diberantas dengan cara "pressure" dari seluruh lapisan masyarakat yang dibangun dalam sebuah "platform" yang bersinergi.

Terakhir saya akan menguraikan tentang kepemimpinan nasional yang diharapkan mampu mengajak rakyat melaksanakan Pancasila, UUD '45 secara konsekwen demi mempertahankan NKRI. Kepemimpinan nasional yang berkualitas, tidak mengecewakan rakyat, bergaya hidup sederhana, mampu membangun regenerasi, mampu membangkitkan semangat bela negara, dan memiliki konsep kemandirian bangsa.

.

2

KEHARUSAN MEMULIHKAN LINGKUNGAN

Kehancuran hutan dan masa depan

Luas daratan Indonesia kurang lebih 191.342.425 juta hektar dengan tutupan hutan pada tahun 1950 seluas 148.300.000 hektar, kemudian pada tahun 1985 luas hutan menyusut menjadi 117.191.550 hektar, dan pada tahun 1997 luas hutan tinggal 95.628.800 hektar. Laju kerusakan hutan di Indonesia setara dengan 6 lapangan sepak bola per menit, dengan kerugian Rp. 83 milyar per hari, atau Rp 31 trilyun per tahun. Penyebab utamanya adalah manajemen kehutanan yang berbasis penebangan kayu dan tidak berwawasan lingkungan, bisnis perkayuan yang menggiurkan, penebangan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan yang tidak ditindak secara serius, serta reboisasi dan penghijauan yang selalu gagal.

Nasib pulau Jawa sangat memprihatinkan, luas daratannya kurang lebih 12,5 juta hektar, memiliki tutupan hutan yang semakin tahun semakin menuju kepunahan. Pada masa pra pertanian, tutupan hutan pulau Jawa hampir sama dengan luas daratannya. Pada tahun 1785, jumlah penduduknya hanya 3,5 juta orang. Tahun 1950 luas hutan pulau Jawa menyusut menjadi kurang lebih 5 juta hektar, jumlah penduduk saat itu kurang lebih 55 juta orang. Tahun 1985 luas hutan pulau Jawa tinggal tidak lebih dari 2 juta hektar, jumlah penduduk sudah mendekati 100 juta orang. Tahun 2004 dari pantauan satelit luas hutan yang dianggap baik di pulau Jawa tidak lebih dari 1 (satu) juta hektar, dan jumlah penduduk telah lebih dari 120 juta orang.

Propinsi Jawa Barat yang secara genesa seharusnya masuk dalam klasifikasi propinsi tersubur, namun faktanya saat ini sangat mengkhawatirkan. Bencana banjir, longsor dan kekeringan silih berganti sepanjang tahun. Hutan negara yang secara normatif mempunyai luas sekitar 800.000 hektar namun kenyataan dari pantauan citra satelit tinggal 300.000 hektar saja yang masih dapat dianggap baik. Di tahun 2003 tercatat lahan yang kritis di Jawa Barat baik di dalam maupun di luar kawasan hutan mencapai 601.557 hektar, bahkan ada yang mengatakan mencapai 895.222 hektar. Lebih parah lagi, tanah subur di puncak-pucak gunung dan bukit di Jawa Barat sejumlah 33 juta ton per tahun tererosi terbawa air ke hilir dan mencemari laut. Rugi dua kali, tanah subur di gunung hilang menjadi lahan kritis, dan lautpun menjadi tercemar. Pada musim hujan potensi sumber daya air Jawa Barat dapat mencapai 81 milyar

m3/ tahun, jumlah ini sangat besar. Akan tetapi karena hutan di puncak gunung telah gundul, maka air tidak terkendali menjebabkan banjir dan longsor dan banyak merenggut korban jiwa dan harta. Pada musim kemarau potensi sumber daya air menyusut menjadi hanya 8 milyar m3/ tahun, dan kualitasnyapun sangat buruk akibat pencemaran limbah. Padahal kebutuhan air Jawa Barat total 17 milyar m3/ tahun. Berlebihan menjadi bencana banjir dan longsor di musim penghujan, serta kekurangan air menjadi bencana kekeringan di musim kemarau. Kerusakan kawasan lindung dan kerusakan iklim mikro di Jawa Barat telah menjelang titik kritis. Daya dukung dan daya tampung wilayah telah mencapai batas kemampuan. Kawasan lindung yang tersisa tidak mampu lagi menjadi perisai terhadap perubahan iklim global, bencanapun menjadi langganan rutin setiap tahun dan kerugian mencapai milyaran bahkan trilyunan rupiah setiap tahun.

Menurut statistik dari tahun 1995 hingga 2003, gangguan terhadap hutan di Jawa Barat terdiri dari perambahan hutan (10%), pencurian kayu (80%), kebakaran hutan (7%), dan bencana alam (3%). Pencurian kayu menempati posisi tertinggi perusak hutan di Jawa Barat. Hal inilah yang seharusnya menjadi bahan pemikiran para pihak yang berwenang, terutama di dalam rangka restrukturisasi industri perkayuan di Jawa Barat. Bisa dimaklumi pencurian dan bisnis kayu liar semakin marak dan menggiurkan, manakala kebutuhan kayu mencapai 2,5 juta m3/ tahun, sedangkan kemampuan pasokan kayu dari dalam Jawa Barat sendiri secara resmi hanya 300.000 m3/ tahun.

Upaya reboisasi dan penghijauan yang dilakukanpun sangat mengecewakan. Pengalaman awal gerakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada tahun 2003/2004 memberikan fakta bahwa tanaman yang hidup hanya kurang dari 30%. Penyebabnya antara lain yaitu: gerakan rehabilitasi ini merupakan hajat pemerintah dan tidak mengajak rakyat secara semesta, bibit tidak bermutu, bibit tidak sesuai lahan, bibit tidak sesuai keinginan masyarakat setempat, dan yang paling ironis adalah salah musim tanam.

Dampak nyata dari kerusakan hutan dan lahan ini adalah kerusakan daerah aliran sungai di seluruh Indonesia. Padahal sebenarnya posisi tawar Indonesia adalah sebagai paru-paru dunia dan sebagai penyumbang uap air terbesar karena potensi hutan tropis dan posisinya sebagai benua maritim. Dari total 136 DAS besar di Indonesia, yang sangat kritis 31%, kritis 41% dan cukup kritis 28%. Dari total 40 DAS di Jawa Barat 50% termasuk dalam klasifikasi kritis.

Musim tanam yang terlambat dan seringnya gagal panen karena bencana banjir, kekeringan serta mis-manajemen sumber daya alam, menyebabkan negara Indonesia yang sebenarnya kaya raya ini terpaksa harus mengimpor bahan makanan seperti gandum 4 juta ton/ tahun, beras 2,5 juta ton/ tahun, jagung 1,5 juta ton/ tahun, kedelai 1 juta ton/ tahun, bahkan gaplek 0,6 juta ton/ tahun, yang setara dengan impor *air maya* sebanyak 20 giga m3/ tahun.

Ancaman alih fungsi perkebunan

Situasi dan kondisi perkebunan juga tidak jauh berbeda dengan nasib hutan yang dari waktu ke waktu terus mengalami degradasi. Luas Jawa Barat 3.647.392 ha, dengan proyeksi luas Kawasan Lindung 1.641.326 ha (45% luas Jawa Barat), terdiri dari hutan negara seluas 791.748 ha (22%) dan Kawasan Lindung bukan hutan negara seluas 849.578 ha (23%) yang terdiri dari lahan rakyat 533.372 ha dan perkebunan 316.206 ha. Status kawasan tersebut telah diatur di dalam perturan mulai dari Undang-Undang sampai kepada Peraturan Daerah, namun pada kenyataannya telah terjadi alih fungsi kawasan yang sangat merugikan lingkungan, termasuk pula di kawasan perkebunan. Perlu diketahui dari luasan perkebunan yang ada di dalam kawasan lindung Jawa Barat, 60% adalah perkebunan rakyat, 20% adalah perkebunan besar swasta, dan 20% adalah perkebunan besar negara. Bahkan potensi pengembangan perkebunan di Kawasan Lindung Jawa Barat yang terdiri ketiga klasifikasi tersebut dapat mencapai sekitar 460.000 hektar.

Sangat ironis justru alih fungsi lahan perkebunan tersebut banyak terjadi karena pengembangan proyek yang kontra produksi dengan konsep perkebunan yang sebenarnya, melalui persetujuan atau dorongan unsur-unsur pemerintahan baik di pusat maupun daerah. Sebagai contoh adalah rencana pengembangan wisata terpadu, lapangan golf, permukiman eksklusif, dan lain-lain di lahan perkebunan yang seharusnya menghasilkan

produk perkebunan dan mampu berfungsi lindung. Dalam hal ini pihak perkebunan harus mampu mempertahankan lahan perkebunannya dengan meminta dukungan luas dari masyarakat pencinta lingkungan. Sebaliknya, secara internal pihak perkebunan juga harus mampu melaksanakan sistem manajemen perkebunan yang berkelanjutan, misalnya saja tidak menyewakan lahan perkebunan untuk fungsi lain yang kontraproduktif. Dengan paradigma perkebunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan pastilah banyak pihak di dalam masyarakat akan mendukung dan menyelamatkan kiprah perkebunan yang secara ekonomis masih sangat diperlukan.

Sejak 1997 terjadi penjarahan secara liar maupun terorganisir, sehingga banyak hutan negara dan perkebunan yang rusak berat. Kawasan perkebunan yang paling banyak rusak adalah perkebunan swasta yang umumnya sudah habis masa HGU-nya, sehingga banyak lahan yang dikuasai oleh perambah. Sementara itu tanaman yang sudah tua dan tidak produktif lagi banyak yang ditebang para petani dan ditanami tanaman musiman, seperti jagung, ketela, dan palawija lain yang tidak memiliki fungsi hidro-orologis untuk konservasi tanah dan air. Bahkan di beberapa kawasan telah beralih fungsi menjadi permukiman, hotel dan villa. Sebenarnya para petani di sekitar perkebunan sudah memaklumi bahwa usaha perkebunan cukup menguntungkan. Di sekitar perkebunan swasta juga umumnya banyak tanaman perkebunan milik petani yang hasilnya dijual ke pabrik milik swasta tersebut. Namun karena produksi perkebunan swasta tersebut terlalu rendah dan HGU-nya

habis maka banyak pabrik pengolahan tidak berjalan lagi, sehingga petani di sekitar perkebunan tidak bisa menjual hasilnya ke pabrik, bahkan kemudian menebang kebun miliknya. Akhirnya banyak tanaman perkebunan yang ditebang dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Namun di beberapa tempat dimana pabrik pengolahan masih berjalan banyak petani yang mempertahakan perkebunannya.

Tidak peka lingkungan

Mengapa hal ini bisa terjadi? Kerusakan lingkungan ini pada dasarnya disebabkan oleh mis-manajemen sumber daya alam, antara lain:

a. Kurangnya *sense of crisis* dari semua pihak baik pusat maupun daerah, baik birokrat, pengusaha maupun warga masyarakat.
b. Terjadi tumpang tindih dan ketidak sesuaian antara peraturan perundangan yang di buat oleh Pemerintah Propinsi dengan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten, misal RTRW Propinsi menyebutkan sebagai kawasan lindung, namun RTRW Kabupaten menyebutkan sebagai kawasan permukiman. Peraturan perundangan yang dibuat lebih kepada aspek *use oriented* bukan *environment oriented* atau *sustainable oriented.*
c. *Leadership* yang tidak tegas dan inkonsisten, misal peraturan yang dibuat dilanggar sendiri.
d. Kritis korektif dari masyarakat peduli lingkungan tidak ditanggapi oleh birokrat, baik eksekutif maupun legislatif.

e. Pemerintah Daerah lebih mengejar pemasukan PAD dengan kegiatan ekonomi jangka pendek yang tidak berwawasan lingkungan, misal kegiatan alih fungsi kawasan lindung menjadi kawasan penambangan galian C.
f. Sangat ego sektoral, misal masalah hutan dan air yang tidak pernah dibahas secara terpadu.
g. Kebijakan yang tidak mantap dan tidak tuntas mengenai pemeliharaan infrastruktur alam penunjang kehidupan, masalah kependudukan dan perilaku warga, dan tatanan kelembagaan di kalangan masyarakat.

Kawasan lindung berbasis rakyat

Bagimana upaya memulihkan kerusakan lingkungan yang terjadi? Prinsip utama adalah komitment secara konsisten tentang penataan ruang yang benar dengan konsep kawasan lindung berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) dan kearifan lokal. Beberapa hal lain yang harus dimiliki antara lain:

b. Pimpinan birokrasi harus memiliki leadership yang tinggi, berwawasan lingkungan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
c. Seluruh jajaran warga Jawa Barat harus bersatu, peduli dan mampu mengurangi dan mengendalikan tekanan lingkungan yang semakin lama semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya.
d. Penataan ruang wilayah Jawa Barat jangan berbasis wilayah per wilayah kabupaten/ kota tanpa koordinasi dengan propinsi yang faktanya

memunculkan RTRW kabupaten/ kota yang tidak selaras dan saling bertabrakan. RTRW kabupaten/ kota seharusnya berbasis DAS dan kearifan lokal, sehingga antara kabupaten/ kota tidak bertabrakan. Kawasan lindung seluas 45% dari seluruh luas wilayah Jawa Barat harus ditarget bisa dipulihkan dalam waktu 5 sampai 10 tahun.

e. Tata guna lahan untuk pertanian harus disesuaikan dengan keadaan topografi dan *landscape* setempat. Tidak berbudi daya lahan basah atau bersawah di daerah ketinggian dengan kemiringan terjal karena akan mengganggu stabilitas tanah menjadi longsor. Daerah ketinggian dengan kemiringan terjal seharusnya untuk budidaya lahan kering semacam *agroforest* atau wanatani. Bila dikelola dengan baik, hasil budidaya *agroforest* ini bisa berlipat 5 sampai 7 kali dibanding dengan budidaya sawah di tempat yang sama. Tebing atau talud di wilayah *agroforest* harus ramah lingkungan dan ditanami dengan rumput gajah. Selain menjaga kestabilan tanah, juga mendukung kegiatan yang besar manfaatnya, yaitu peternakan. Kombinasi antara agroforest dan peternakan akan menghasilkan keuntungan ganda, yaitu: kawasan lindung dan iklim mikro pulih, hasil hutan non kayu sebagai komoditas unggulan (buah-buahan, getah, madu, sutera liar, ekowisata atau agrowisata).

f. Pembibitan tanaman kawasan lindung harus digalakkan dengan masyarakat sebagai peran utamanya. Pemerintah harus berpihak kepada masyarakat pelaku pembibitan, dan kegiatan

pembibitan ini harus mampu menjadi gerakan ekonomi rakyat.

Salah satu cara untuk membangun kembali fungsi lindung di kawasan perkebunan adalah Pemerintah melalui Dinas Perkebunan harus dapat memberikan secara cuma-cuma bibit MPTS (*Multi Purpose Trees Species*) antara lain: karet, teh, kopi, kelapa, buah-buahan, melinjo, dll. Juga tanaman lain antara lain: tanaman pupuk hijau atau pembatas teras (lamtoro, jarak, dll) dan *cover crops* (rumput, *centrocema*, kapulaga, dll) sesuai dengan yang diperlukan, diminta dan disenangi baik oleh petani yang memiliki perkebunan rakyat ataupun petani yang menguasai lahan perkebunan. Pada dasarnya petani di desa ingin memiliki banyak jenis tanaman baik untuk tanaman musiman maupun tanaman keras, tetapi mereka tidak memiliki modal untuk membeli bibit atau membibitkan. Kalau bibit diberikan secara cuma-cuma diharapkan mereka menanamkannya. Kalau mereka dimodali atau dibeli bibitnya diharapkan mereka akan membibitkan dengan baik. Cara lainnya adalah bila kondisi memungkinkan, tanah perkebunan yang habis masa HGU-nya bisa diserahkan kepada petani, tetapi dengan syarat harus ditanami tanaman keras perkebunan dan tanahnya tetap berstatus HGU, dengan status petani sebagai plasma PIR dan menggunakan swasta perkebunan sebagai inti PIRnya. Bibit dan biaya tanamnya (hibah ataupun kredit) harus diberikan oleh pemerintah dengan pengelolaan oleh pihak perkebunan, sehingga lahan tetap ditanami tanaman keras. Dengan pengelolaan yang baik, lahan perkebunan paling tidak dapat menyerap sekitar 330.000

orang tenaga kerja. Pada saat ini hutan negara hanya menyerap sekitar 100.000 tenaga kerja dengan laba yang sangat kecil (tidak wajar). Dengan rusaknya Kawasan Lindung, PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto) Jawa Barat akan turun sedikitnya Rp 9,511 trilyun pertahun dari pengurangan produksi padi, sayuran, ikan air tawar, rumput untuk ternak, listrik, air minum PDAM, obat-obatan untuk rakyat, tanaman dan ternak, kerusakan akibat banjir dan longsor, dan bantuan untuk korban banjir dan longsor. Agar dapat mengembalikan kerugian PDRB sebesar itu diperlukan biaya reboisasi Kawasan Lindung sebesar Rp 3,17 trilyun, yang bila dikerjakan dalam 10 tahun diperlukan Rp 317 milyar pertahun dengan disertai pelarangan penebangan kayu selama 10 tahun, dan apabila pemerintah mampu paling tidak harus menyediakan bibit kayu dan MPTS sebanyak 66 juta bibit per tahun.

Bagaimana dengan peran penyuluh kehutanan, perkebunan dan pertanian? Dengan luasnya lahan kritis di hutan maupun di luar hutan, serta besarnya biaya yang diperlukan bila program penghijauan harus menjadi beban anggaran, perlunya upaya percepatan pencegahan becana yang semakin meluas, serta perlunya membangun kembali kesadaran memelihara hutan , maka upaya penghutanan kembali harus merupakan gerakan kesemestaan dimana peran utama harus dilakukan oleh rakyat, rakyat mengambil peran utama dalam pengelolaan hutan di Jawa Barat. Oleh sebab itu upaya penyuluhan hutan harus diarahkan untuk menciptakan kader penyuluh rakyat, sehingga rakyat pada umumnya mendapat penyuluhan dari kader rakyat tersebut. Dengan

demikian penyuluh kehutanan, perkebunan dan pertanian harus mampu membangun dan mengembangkan *net-working* dengan rakyat. Fungsi hutan: *no forest, no water, no future* atau *leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak,* harus merupakan basis pemahaman fungsi hutan di Jawa Barat, logika alam ini telah teruji kebenarannya dan harus menjadi rujukan dasar dalam pegelolaan hutan dan sumberdaya air di Jawa Barat. Sebagai contoh penerapannya adalah pada penyikapan dan penyembuhan kerusakan sungai (atau sakitnya sungai) di Jawa Barat, yang meluap di musim hujan namun kekeringan di musim kemarau serta memiliki kadar erosi dan pencemaran yang sangat tinggi, maka pemecahan utamanya adalah hutan di hulu yang harus disembuhkan dulu. Saat ini penjarahan hutan secara terorganisir sudah mulai terpojok dan dapat dihancurkan, sehingga inisiatif harus sudah bisa diambil oleh pihak-pihak yang pro untuk menghutankan kembali, maka dalam hal ini kekuatan rakyat untuk memulihkan hutan harus dibina dan dihargai sehingga kepercayaan dirinya untuk memulihkan hutan bisa bangkit lagi. Para penyuluh kehutanan harus kreatif dan penuh inisiatif mencari bahan-bahan baru dan mudah dimengerti oleh rakyat sehingga rakyat dapat menerima bahan-bahan penyuluhan dengan penuh keyakinan.

Bebarapa contoh pemahaman kreatif tentang upaya pemulihan dan pengelolaan hutan dapat dikemukakan sebagai berikut: untuk percepatan pemulihan hutan di Korea mereka membuat Hari Pohon, di mana pada hari itu para pekerja dan pelajar di liburkan untuk bersama-sama menanam pohon, dan tahun berikutnya mereka

menanam lagi pohon sambil melihat pohon yang ditanamnya tahun lalu. Masih di Korea, seorang sopir taxi sangat bangga menunjukkan lahannya yang menjadi hutan, karena pemerintah menggunakan lahannya untuk hutan sehingga sopir itu memiliki saham di hutan itu, dan segala rumah serta mobilnya adalah hasil dari kompensasi dan hasil usaha hutan itu dari pemerintah.

Pemahaman yang mengagetkan terlontar dari penduduk di Cimalaka Sumedang yang kekurangan air karena matinya banyak sumber mata air karena penebangan hutan dan penggalian pasir yang tidak bertanggung jawab. Ketika sebagai solusi pemecahan permasalahannya diajak untuk menanam lagi pohon di hutan, jawabannya adalah *"abdi mah teu butuh kai, tapi butuh cai"*. Para penyuluh kehutanan dalam hal ini bukan saja harus bisa menjelaskan pentingnya hutan, namun juga harus mampu memberikan solusi atas masalah nyata yang sedang dihadapi masyarakat saat itu.

Seperti halnya dengan revitalisasi lahan perkebunan maka reboisasi di lahan milik rakyat juga akan berhasil baik dengan fasilitasi bibit dan penampungan produk hasilnya. Kalau perusahaan perkebunan jeli dalam hal ini, justru akan mendapatkan banyak pasokan produk yang dapat diandalkan dan mengembangkan usaha berbasis pasokan itu. Perkebunan harus berani investasi untuk pengolahan lanjut produk lahan rakyat ini, dengan pilihan teknologi yang lebih mampu bersaing dan jaringan pemasaran yang lebih luas. Kegiatan rakyat ini bisa menyerap paling tidak 496.000 tenaga kerja dan akan berdampak baik untuk konservasi lingkungan dan

perekonomian rakyat serta negara. Beberapa gerakan swadaya rakyat untuk ini menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan, di Cibugel Sumedang, Mekarmanik Bandung Utara, Mekarsari Pangalengan, dan Panjalu Ciamis.

Proyeksi luas pemulihan kawasan lindung dan perkiraan kebutuhan dana untuk perbaikannya dapat dilihat pada tabel, dengan catatan untuk hutan negara 1.000 bibit/ ha,

Kws Lindung	Luas (ha)	Rusak (ha)	Bibit (pohon)	Biaya (Rp Juta)
(a) Kawasan Hutan Negara (22%)				
1) Hutan Konservasi	111.465	22.293 (20%)	22.293.000	111.465
2) Hutan Lindung	218.000	65.400 (30%)	65.400.000	327.000
3) Hutan Produksi	462.806	231.403 (50%)	231.400.000	1.155.480
Jumlah (a)	**791.748**	**319.096 (40%)**	**319.096.000**	**1.593.945**
(b) Kawasan Non Hutan (23%)				
1) Perkebunan	316.206	63.241 (20%)	50.592.000	252.960
2) Kebun Campuran	289.708	144.854 (50%)	115.883.000	579.415
3) Tegalan	243.664	121.832 (50%)	97.465.000	487.325
Jumlah (b)	**849.578**	**329.927 (38%)**	**263.940.000**	**1.319.700**
Jumlah (a)+(b)	**1.641.326**	**649.023 (39%)**	**583.036.600**	**2.913.645**

Tabel: Pemulihan kawasan lindung dan perkiraan kebutuhan dana

untuk kawasan non hutan maksimum 800 bibit/ha, biaya tanam dan bibit maksimum Rp 5.000 per pohon. Di kawasan non hutan sebaiknya berupa MPTS (Multi Purpose Tree Species), antara lain yaitu nangka, alpukat, durian, lengkeng, sukun, jambu mete/ jambu bol/ jambu air/ jambu batu, kelapa, karet, teh, pete, kopi, jengkol, duku, manggis, kemiri, mangga, rambutan, rami, aren, kakao, dan tanaman lainnya yang tahan hama/ penyakit dan mampu mengkonservasi tanah dan air.

Dalam waktu 50 tahun lagi penduduk Jawa Barat akan menjadi 2 kali lipat, bertambah 35 juta orang lagi, sehingga harus mulai dipikirkan cara paling handal untuk meningkatkan manfaat lahan perkebunan baik secara ekonomik maupun ekologik. Sebagian besar lahan ini bersentuhan dengan penduduk di pedesaan yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Rancangan pengembangan usaha perkebunan di Jawa Barat akan sangat ditentukan oleh kemampuan merancang keterkaitan kesejahteraan dengan masyarakat sekitar, disamping meningkatkan keterkaitan ekosistem dan memperkaya keanekaragaman hayati yang dikelolanya. Cobalah kembangkan lebih banyak model kerjasama dengan petani sekitar perkebunan untuk pilihan masa depan.

DPKLTS pejoang lingkungan

Saya sangat menghargai gerakan lingkungan yang berbasis kerakyatan, seperti misalnya Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), yang mendasarkan kemampuannya semata-mata kepada semangat pengabdian dalam keyakinan. DPKLTS adalah lembaga masyarakat independen yang aktivitasnya berfokus kepada pelestarian hutan dan menjaga mutu lingkungan hidup, serta pembinaan masyarakat desa hutan. Pada dasarnya tugas dan fungsi DPKLTS adalah melakukan kontrol, audit, dan melakukan gugatan publik *(class action)* dalam rangka mengawal pengelolaan dan pengurusan hutan di Jawa Barat sebagaimana dijamin

dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolan Lingkungan Hidup, dan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. DPKLTS dibentuk pada tanggal 10 September 2001, di Padepokan Tadjimalela di kaki Gunung Manglayang, Cilengkrang, Kabupaten Bandung, oleh para sesepuh, masyarakat adat, organisasi rakyat, perwakilan masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, mahasiswa, budayawan dan seniman, serta perorangan.

Cita-cita DPKLTS mengenai konsep pemulihan kawasan hutan di Jawa Barat tercermin pada visi sebagai berikut: *terciptanya sumberdaya hutan dan lingkungan yang kaya manfaat dan berkelanjutan sesuai dengan kearifan alam, tatanan masyarakat adab dan adat karuhun Sunda yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, moral dan etika; geledegan leuweungna, recet manukna, curcor caina, gemah ripah rakyatna* (rimba hutannya, ramai bersahutan bunyi burungnya, melimpah airnya, makmur rakyatnya).

Untuk menggapai visi tersebut, DPKLTS memiliki misi: menghimpun seluruh potensi masyarakat Tatar Sunda untuk membangun kembali tatanan masyarakat adab dan adat karuhun sunda yang sadar akan manfaat keberadaan hutan dan mutu lingkungan : *nyaah ka leuweung, mulasara walungan, ngawangun lembur nu genah jeung dayeuh nu merenah,* (peduli hutan, memelihara sungai, membangun desa yang nyaman dan kota yang teratur).

Nilai dasar yang dipakai DPKLTS untuk merealisasikan visi misi adalah: *Siliasih, Siliasah, Siliasuh ngawangun Siliwangi pikeun generasi ayeuna jeung anu bakal*

datang, dina raraga ngangkat harkat darajat urang Sunda pikeun kajembaran Bangsa Indonesia jeroning tatanan Nagara Kesatuan Republik Indonesia, (saling mengasihi, saling mencerdaskan, saling menyejahterakan membangun sinergi saling mewangikan untuk generasi sekarang dan mendatang dalam upaya mengangkat nilai dan derajat masyarakat Sunda untuk keagungan bangsa Indonesia dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Landasan Kerja DPKLTS adalah pemulihan hutan untuk kehidupan yang berkelanjutan**:** Tidak Ada Hutan, Tidak Ada Air, Tidak Ada Masa Depan. *No Forest, No Water, No Future. Leuweung Ruksak, Cai Beak, Manusa Balangsak.*

DPKLTS akan terus konsekwen memulihkan kawasan lindung, dengan motto: *Kami moal ngelehan, kami moal ngelehkeun, tapi pasti nepi ka tujuan. Ngan hampura! bisi aya nu kalabrak, kasered kabawa palid, kabanjiran jeung kakeueum, da bongan ngahalangan, jeung aya dina jajalaneun kami,* (Kami tidak akan mengalah, kami tidak akan mengalahkan, tetapi pasti sampai ke tujuan. Namun mohon dimaafkan kalau ada yang kelabrak, terseret terbawa banjir bandang, kebanjiran atau tenggelam, karena salahnya sendiri menghalangi dan ada di lintasan jalan kami).

Satu hari berikutnya setelah terbentuknya DPKLTS, yaitu pada tanggal 11 September 2001 (bertepatan dengan teror terhadap gedung WTC di New York), bertempat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, DPKLTS menyampaikan *Tuntutan Manglayang* yang

mendesak dilakukannya *moratorium logging* di Jawa Barat.

Kita yakini sepenuhnya bahwa rusaknya hutan pasti akan menyebabkan rusaknya lingkungan dan rusaknya lingkungan pasti akan menyebabkan rusaknya budaya dan kehidupan masyarakatnya. Oleh karena itu apa saja yang mengganggu kehidupan dan menghambat upaya kesejahteraan rakyat patut ditanggapi sebagai lawan yang harus dihadapi. Menghadapi keadaan yang serba sulit dan berat ini, mengharuskan kita teguh berpegang kepada prinsip kesemestaan dan kesinambungan. Khususnya peran pimpinan dan pemerintah sangat penting karena merupakan penanggungjawab utama dalam percepatan pemulihan kondisi lingkungan di Jawa Barat. Seluruh jajaran aparat pemerintah harus bersikap lebih pro-aktif dalam merespon dan memfasilitasi inisiatif rakyat yang sadar lingkungan. Ketentuan-ketentuan yang tumpang tindih ditambah dengan egoisme sektoral yang kental, sungguh telah memperburuk keadaan. Ketegasan korektif dan ketegasan penentuan arah kebijakan harus dimiliki oleh setiap tingkatan kepemerintahan. Desentralisasi kewenangan melalui kader-kader yang terpercaya akan menumbuhkan kembali keunggulan lokal, sebagai syarat utama keikutsertaan rakyat secara semesta. Membiarkan proses rusaknya lingkungan secara berlarut-larut, melaksanakan rehabilitasi lingkungan yang lamban, bukanlah salah rakyat, tapi mutlak merupakan ketidak berdayaan kita sebagai pimpinan. Oleh karena itu pimpinan yang kuat dan bersih adalah kunci bagi keberhasilan. Kita harus mampu membentuk *corps*

kepemimpinan baru yang terdiri dari generasi muda yang bersih, dinamis, kreatif. *Regeneration* merupakan keharusan. Mari kita maju terus, esa hilang dua terbilang, *beberes babarengan*, maju babarengan, rakyat Tatar Sunda harus mampu tampil sebagai pelopor penyelamatan bukan saja se Tatar Sunda tapi bahkan seantero negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Rakyat harus mampu dan berani bersikap kritis korektif terhadap penyelewengan-penyelewengan, khususnya yang dilakukan oleh birokrasi yang berdampak terhadap merosotnya kondisi lingkungan hidup.

Kasus Jatigede

Jangan buru-buru membangun waduk

Saya tidak anti pembangunan, juga tidak anti pembangunan waduk Jatigede dengan syarat jangan dibangun pada kondisi saat ini. Negara tidak punya uang, kawasan tangkapan air daerah aliran sungai (DAS) Cimanuk kritis, sungai Cimanuk pun sedang sakit. Sehatkan dulu infrastruktur alamnya, sehatkan dulu kawasan lindung di hulu DAS Cimanuk, jangan buru-buru membangun infrastruktur buatan yang mahal dari biaya ngutang, yang belum tentu manfaatnya berkelanjutan karena akan banyak risiko yang dihadapi seperti masalah sosial, pelumpuran dan kegempaan.

Doktrin alam mengemukakan kalau hutan sakit pasti sungainya sakit, pada gilirannya terjadilah bencana *no forest - no water - no future, leuweung ruksak - cai beak*

- *manusa balangsak,* musim kemarau kekeringan, musim hujan banjir bandang disertai tanah longsor. Menyembuhkan sungai yang sakit hanya bisa diobati dengan menyembuhkan hutan di DAS tersebut. Rusaknya kawasan lindung Jawa Barat sangat difahami sebagai penyebab utama hancurnya sistem pengelolaan air dan timbulnya bencana lingkungan maupun sosial di Jawa Barat. Upaya pemulihan dan pemeliharaan hutan serta lingkungan merupakan jaminan kesinambungan peradaban yang sangat dipercaya oleh masyarakat Jawa Barat.

Dalam hal ini infrastruktur alam, yaitu hutan dan sungai, tidak boleh tidak harus dibangun kembali dengan cara-cara yang paling tepat dan bebas dari risiko penyimpangan, baik yang bersifat teknis maupun administratif. Bila hutan sehat, pasti sungainya juga sehat. Tidak bisa menyembuhkan sungai sakit tanpa terlebih dahulu menyembuhkan hutan dalam DAS terkait. Hal ini sangat dipahami oleh Menteri Kehutanan sehingga berani menyatakan bahwa manajemen DAS dan badan sungai seharusnya menjadi tugas dari Departemen Kehutanan.

Sungai sakit jangan diberi beban

Panjang sungai Cimanuk 180 km, dengan luas DAS 347.697 ha, mencakup wilayah pemerintahan Kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka, dan Indramayu. Curah hujan 1500-3000 mm/tahun. Kawasan lindung Cimanuk hulu terdiri atas hutan konservasi, hutan lindung, dan

kawasan lindung di luar hutan. Luas kawasan lindung 161.472 ha (47%), memiliki lahan kritis hutan 28.414 ha, di luar kawasan hutan 141.221 ha, total 169.639 ha. Seharusnya sungai Cimanuk jangan diberi beban terlebih dahulu sebelum fungsi kawasan lindung di hulu DAS dipulihkan.

Diperlukan anggaran rehabilitasi hutan dan lahan DAS Cimanuk 169.639 ha x Rp 4.298.320/ ha = Rp 729.162.706.480,-. Bandingkan betapa biaya tersebut masih jauh lebih rendah dari pada rencana proyek waduk Jatigede. Menurut konsultan Colenco dan BBV (2000), biaya membangun infrastruktur ini mencakup bendungan dan pelengkapnya US$ 361 juta, irigasi US$ 280 juta, permukiman US$ 24 juta, lain-lain US$ 23 juta, bunga utang US$ 104 juta, jumlah semua US$ 792 juta atau sekitar Rp 7 trilyun.

Dalam pertemuan dengan Menteri Negara Bappenas beberapa waktu yang lalu, dikatakan bahwa akan dilakukan koordinasi kembali dengan Menteri PU. Juga Menteri Lingkungan Hidup mengatakan kepada DPKLTS akan mengevaluasi terlebih dahulu, karena kondisi alam sungai Cimanuk sudah sangat berbeda dengan kondisi pada saat rencana waduk Jatigede ini digulirkan pada tahun 1960-an. Bahkan Menteri Kehutanan paham betul tentang risiko pembangunan waduk Jatigede sebelum tangkapan air di hulunya disehatkan dulu. Menteri Pekerjaan Umum juga menyampaikan pengalaman dengan masyarakat Danau Tempe, bahwa ia tidak akan berbuat sesuatu di Danau Tempe sebelum hutannya dibangun kembali. Bahkan

untuk rencana bendungan Jatigede pun dikemukakan hal serupa tidak akan berbuat sesuatu sebelum hutannya dibangun kembali dan pada tahun 2008 baru akan dilakukan evaluasi kembali pembangunan yang harus dilakukan.

Sebenarnya pada kesempatan inilah saatnya dijalin sinergi antara sektor pengairan di Departemen Pekerjaan Umum dengan sektor kehutanan di Departemen Kehutanan untuk membangun infrastruktur alam hutan dan kawasan lindung, yang pada gilirannya akan memenuhi kebutuhan sumber daya air secara berkelimpahan dan terkendali. Sayangnya pada kesempatan lebih lanjut sikap di atas tidak dipegang teguh, kebijakan Menteri Pekerjaan Umum tidak konsisten, argumentasi kearifan lingkungan yang sangat cerdas dan elegan tadi dengan gampangnya dikesampingkan begitu saja. Pada saat yang sama Departemen Pekerjaan Umum masih tetap melakukan pembebasan lahan, dan selanjutnya tetap akan membangun waduk Jatigede. Saat gencar-gencarnya mengundang investor asing seakan-akan sah-sah saja menjual proyek Jatigede sebagai proyek siap bangun untuk mendapatkan dana segar secara cepat dengan melupakan pertimbangan logis dan komitmen sosial politik sebelumnya.

Saya telah mengusulkan ke Presiden SBY supaya rencana pembangunan waduk Jatigede ini dikaji lagi, pembebasan lahan dihentikan, kehidupan sosial di masyarakat dinormalkan kembali karena telah puluhan tahun terkatung-katung, dan terakhir pada tahun 2008

setelah program rehabilitasi selesai sebaiknya kita kaji bersama. Kami percaya bahwa dengan sembuhnya hutan, sungaipun akan sehat kembali, dan alternatif pembangunan waduk belum tentu juga diperlukan.

Terlepas dari argumentasi apakah investasi asing yang dipilih akan menguntungkan atau sebaliknya lebih memojokkan posisi Indonesia, namun pada kondisi saat ini sang investor tertarik berinvestasi dalam suatu proyek besar berjangka panjang pasti memiliki pertimbangan untuk dapat mengeruk keuntungan yang lebih besar di bidang lain, seperti berupa desakan untuk dapat menggali sumber daya alam lain, atau bahkan desakan membuka benteng pasar lokal yang seharusnya kita pelihara sendiri.

Pembangunan waduk Jatigede meminta pengorbanan rakyat yang sangat besar, bahkan terlalu besar. Dalam waktu dekat sebanyak 7.163 kepala keluarga akan terusir dari kampung halamannya yang telah begitu lama memberikan kesejahteraan dan jaminan masa depannya, tercerabut sepenuhnya dari tatanan budaya dan alam yang selama ini menghidupinya. Pengalaman menggusur penduduk memberi pelajaran kepada kita, bahwa menghadapi masa depan di lokasi permukiman baru yang telah ditentukan biasanya lebih tidak menentu.

Wilayah yang akan ditenggelamkan meliputi luas 4.143 hektar yang terdiri dari 29 desa dalam 6 kecamatan yang makmur, memiliki infrastruktur yang telah mantap dan lengkap berupa jalan, irigasi, sekolah, puskesmas, dan lain-lain. Tercakup pula di dalamnya kawasan hutan

seluas 1.200 hektar, persawahan subur yang bisa dipanen tiga kali dalam setahun seluas 1.900 hektar, kebun campuran seluas 430 hektar. Selain beberapa kota kecamatan yang sudah sangat maju dan puluhan desa yang subur akan terendam air, lokasi rencana waduk Jatigede adalah daerah yang tua sarat dengan kandungan sejarah Jawa Barat yang ditunjukkan dalam berbagai situs yang merupakan potensi budaya besar bagi Jawa Barat.

Bukan sekedar berandai-andai, karena lokasi rencana bendungan Jatigede terletak di daerah yang memiliki sejarah kegempaan merusak dan tanah di sekitarnya sangat rawan longsor, maka kalau jebol air waduk sebanyak ratusan juta meter kubik akan menjadi bencana air bah yang melanda kawasan hilirnya dengan kerusakan yang sulit diramalkan. Coba tinjau kembali bersama para pakar gempa, kebanyakan mereka mengkhawatirkan hal ini. Apakah pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Departemen Pekerjaan Umum mau bertanggung jawab bila hal ini terjadi?

Konsep lumbung air lebih murah

Pembangunan waduk Jatigede terpaku hanya pada satu konsep keinginan yaitu membangun waduk sejak tahun 1960-an, tidak pernah dicoba dibandingkan dengan opsi lain seperti perbaikan DAS dengan cara pemulihan hutan di kawasan lindungnya. Masih selalu menerapkan pola pikir yang sangat sektoral, bukan memperbaiki sumber airnya yang bocor malah memilih menyiapkan ember

besar untuk menampung kebocoran. Kondisi kesehatan sungai di tahun 1960-an berbeda dengan sekarang yang telah sakit parah, sungai sakit malah akan diberi beban yang seharusnya dipulihkan dulu kesehatan sungainya.

Biaya pemulihan hutan dan kawasan lindung yang kritis jauh lebih murah dari pada membangun waduk. Dengan perkiraan biaya per hektar sekitar Rp. 4 juta, maka untuk total 170.000 hektar lahan kritis diperlukan tidak akan lebih dari Rp. 1 trilyun berikut biaya pemeliharaannya. Bahkan masyarakat setempat akan memperoleh peningkatan kesejahteraan bila diberikan peran utama sebagai tenaga pelaksana dan pengawasnya. Dengan upaya pemulihan hutan secepatnya, dalam waktu 2 tahun dipastikan kondisi hidro-orologis wilayah ini akan mulai pulih. Ini bukan mitos, bahkan pakar lingkungan Prof. Dr. Otto Sumarwoto-pun meyakini hal ini. Beliau lebih ekstrim lagi, biarkan kawasan hutan tidak diganggu, tanpa biaya-pun akan pulih fungsi hidro-orologisnya dalam waktu singkat. Dengan demikian rakyat tidak perlu berkorban sedemikian besar. Sungguh kontras dengan kondisi yang akan terjadi kalaupun pembangunan waduk Jatigede ini dipaksakan, karena baru akan selesai 7 tahun dengan biaya Rp 7 trilyun, mengorbankan masyarakat di kolam waduk, dan akan menghadapi kenyataan sedimentasi yang sangat besar dan rawan ancaman bencana gempa.

Untuk mengatasi kebutuhan air terutama di wilayah pantai utara Jawa Barat, dapat dilakukan dengan konsep membangun lumbung air di setiap kabupaten yang sering mengalami kekeringan. Dalam UU No. 41/ tahun

1999 tentang kehutanan disebutkan bahwa setiap daerah aliran sungai (DAS) paling tidak 30% dari luasannya harus berupa hutan. Bila hal ini diterapkan pada DAS-DAS yang mengalir di wilayah pantai utara Jawa Barat, yaitu: DAS Kali Bekasi – Cikarang, DAS Citarum, DAS Pagadungan, DAS Ciherang, DAS Cilamaya, DAS Ciasem, DAS Cipunagara, DAS Kedungwungu, DAS Cilalanang, DAS Cipanas, DAS Pangkalan, DAS Cimanuk, DAS Ciwaringin, DAS Cibagor, DAS Cisanggarung, maka sangat diharapkan bahwa wilayah pantai utara Jawa Barat akan terbebas dari bencana kekeringan di musim kemarau.

Kesalahan besar dan fatal

Dalam situasi saat ini, keputusan membangun Jatigede akan merupakan kesalahan besar yang akan berakibat fatal. Secara ekonomi rasio biaya manfaat proyek waduk Jatigede bisa menjadi semu karena hanya meningkatkan pendapatan satu kelompok, sementara ada kelompok lain yang merugi besar. Pembangunan sarana dan prasarana publik yang berwawasan lingkungan tidak boleh merugikan satu atau sekelompok orang sekalipun.

Sangat bijaksana bila pemerintah membatalkan rencana pembangunan waduk Jatigede, karena sebagian besar warga di wilayah genangan menolak pembangunan waduk baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam. Dalam jangka panjang, pandangan dan sikap warga yang bersedia menerima pembangunan waduk Jatigede dengan syarat, belum tentu konsisten, mereka

bisa berubah sikap, sehingga jika rencana pembangunan waduk Jatigede tetap berlanjut pemerintah akan menanggung ongkos sosial yang sangat besar. Segera bangun lumbung-lumbung air di setiap wilayah dengan memulihkan DAS di masing-masing tempat.

Cobalah dalam situasi krisis sekarang ini kita *back to basic, balik ka pamiangan,* bersikap dewasa, mandiri, swadesi dengan kemampuan sendiri bersama rakyat. Membangun hutan kembali bisa dilakukan secara kesemestaan dan biayanyapun jauh lebih murah, manfaatnya jelas karena DAS akan menjadi lebih sehat. Setelah itu, baru kita evaluasi kembali apakah waduk Jatigede masih perlu, apakah dimensi waduknya bisa lebih kecil.

Ambillah pelajaran bijaksana dari pemerintah Thailand yang dengan kerendahan hati telah bersedia membatalkan bendungan Rasi Salai, setelah masyarakat setempat tidak mau pergi saat air waduk mulai naik menggenang. Juga bercerminlah kepada pengalaman di negeri kita ini, ternyata waduk adalah pemicu kerusakan lingkungan. Setelah waduk dibangun, bagian hulu DAS malah selalu di acak-acak, tidak diperhatikan, dijarah dan dialih fungsi sedemikian rupa, dan bagian hilir waduk tetap saja kekurangan air dan produktivitasnya jauh dari harapan. Faktanya sungai Citarum, dengan tiga waduk yang telah dibangun dan sungainya disodet-sodet, saat ini malah semakin kritis! Seharusnya para pemimpin bangsa ini memberi contoh yang baik, tidak ngutang sana-ngutang sini, untuk membangun infrastruktur yang berisiko tinggi.

Kasus Citanduy

Sungai jangan disodet-sodet

Berkaitan dengan rencana sodetan Citanduy yang telah memunculkan sikap pro dan kontra berkepanjangan dari berbagai pihak, saya menyampaikan pernyataan sikap penolakan dan minta kepada pemerintah agar rencana pekerjaan ini tidak lagi dilanjutkan. Saya setuju dengan maksud penyelamatan Laguna Sagara Anakan (LSA) dalam pengertian fungsi konservasi alamiahnya dilestarikan, yaitu sebagai zona penyangga pemeliharaan kualitas perairan pantai selatan dan sebagai kawasan pemijahan berbagai biota laut, tanpa harus menutup kemungkinan pemanfaatannya bagi masyarakat setempat dengan tidak membahayakan fungsi konservasi termaksud.

Penyodetan sungai Citanduy bagi LSA mempunyai arti melenyapkan 75% dari generator utama siklus alam dan siklus kehidupan LSA yang terjadi secara drastis (resiko adaptasi) yang justru akan mematikan fungsi LSA secara lebih cepat dan pasti.

Penanganan *darurat* LSA yang paling dapat diterima adalah melakukan pengerukan secara *cerdas* yang memungkinkan perlambatan sedimentasi dan percepatan pertumbuhan mangrove sehingga proses alam berada pada kecenderungan mendukung pemulihan fungsi konservasi LSA secara optimal. Pemeliharaan volume

air LSA dan luasan hutan mangrove ini akan berdampak sangat positif bagi pengembangan kehidupan biota, pemeliharaan *sediment transport* secara alami dan penyediaan sarana transportasi laut.

Memperhatikan data pengukuran yang pernah dilakukan selama ini terhadap perubahan warna kekeruhan air laut dan kadar garam di sekitar muara sungai Citanduy hingga teluk Pangandaran, ternyata *saat ini pun* dapat dilihat pengaruh pengeruhan oleh sedimen apung telah mencapai pantai timur Pangandaran.

Sangat beralasan bahwa penyodetan Citanduy yang akan mengamplifikasi jumlah material sedimen dan memindahkan lokasi muara lebih terbuka ke arah barat akan mengakibatkan sedimen secara berurutan akan memenuhi teluk Nusawere dalam waktu yang sangat singkat dan selanjutnya meluas hingga mencapai pantai Pangandaran bahkan akan sampai pula ke teluk Parigi.

Peristiwa di atas akan menyebabkan terkuburnya terumbu karang yang merupakan potensi perikanan yang sangat produktif di teluk Nusawere dan Pangandaran, hilangnya potensi pariwisata Pangandaran karena kekeruhan, dan terancamnya peluang lokasi pelabuhan alam di teluk Parigi yang pada gilirannya akan sangat berdampak negatif pada pengembangan perekonomian berbasis kelautan di pusat kekayaan pantai selatan sepanjang teluk Pangandaran, teluk Parigi dan teluk Penyu, dengan LSA yang berfungsi sebagai penyangga ekosistemnya.

Akar masalah di hulu

Berbagai besaran erosi di hulu DAS Citanduy dan sedimentasi di LSA yang dikemukakan sebagai acuan proyek tidak menunjukkan korelasi yang sesuai, yaitu bahwa luasan lahan kritis di hulu DAS Citanduy semakin berkurang dari tahun ke tahun, sementara LSA semakin menyempit. Penelitian terakhir menunjukkan bahwa pengelolaan lahan pertanian basah tepat di utara LSA memberikan sumbangan yang sangat *significant* pada kemajuan pantai dan pendangkalan LSA yang dikonfirmasi dengan analisis jenis mineral sedimennya. Sementara itu, identifikasi permasalahan sedimentasi di LSA ini tidak dicermati dengan baik oleh pihak proyek terkait.

Kegiatan RLKT yang dilakukan sejak 1984 hingga 1999 telah berhasil menurunkan luasan lahan kritis di hulu DAS Citanduy sehingga total sedimen yang semula 16,778 juta ton per tahun (1984-1991) turun menjadi tinggal 6,353 juta ton per tahun (1992-1999), padahal dalam periode tersebut (1980-1992) pelaksanaan program RLKT baru mencapai 80% pekerjaan sipil dan 50%-70% kegiatan vegetatif.
Angka-angka di atas menunjukkan bahwa upaya pemulihan di hulu DAS seharusnya merupakan pilihan paling tepat untuk menghilangkan sumber pendangkalan dan penyempitan LSA.

Upaya pemulihan DAS dengan RLKT tidak memerlukan periode waktu yang lama, seperti dikhawatirkan oleh

pihak proyek dan tim kaji ulang, karena dalam rangka mengembalikan *siklus hidro-orologi* hanya diperlukan waktu 1-2 tahun dengan *konsep suksesi alami* di tahap awal.

Pada tahap berikutnya, penghijauan atau reboisasi dilakukan secara terarah dan terencana dengan jenis tanaman dan luasan terpilih yang disesuaikan dengan kemiringan lereng, intensitas hujan dan jenis tanah. Pada tahap lanjutan ini terbuka peluang untuk menerapkan inovasi sosial maupun eco-teknikal untuk mencapai sasaran *zero wash load* dan *zero run off*.

Manajemen DAS holistik

Banjir yang selalu menjadi bencana tahunan di wilayah hilir Citanduy merupakan keprihatinan semua pihak. Namun kita maklumi bersama bahwa wilayah hilir ini memang merupakan topografi datar yang dikenal sebagai *flood plain.* Sementara itu perikehidupan masyarakat di wilayah *flood plain* ini tidak ditata dan disiapkan untuk mengantisipasi dan menyesuaikan diri dengan perilaku alamnya.

Konsep *eco-hydrology* dengan cara perbaikan hulu DAS termasuk RLKT adalah pilihan yang *elegant* dan mantap untuk maksud pemeliharaan sungai dan pengendalian banjir daripada menggunakan konsep sodetan ataupun penanggulan. Sodetan Citanduy tidak akan dapat mengatasi masalah banjir, karena sedimen akan terendapkan di muara sodetan yang akan semakin

memperpanjang alur sungai. Dapat dipastikan akan diperlukan sodetan baru lagi ke arah hilir, dan dari sisi dinamika aliran sungai di hulu sodetan akan tetap banjir.

Pemecahan masalah lingkungan hendaknya didasarkan kepada argumentasi obyektif atas hak-hak alam yang seharusnya dipenuhi. Kegagalan pengelolaan lingkungan akan menjadi bencana bagi semua pihak, sedangkan keberhasilan pengelolaan lingkungan juga akan memberikan kesejahteraan bagi semua pihak. Oleh karena itu manajemen atas konflik yang terjadi bukan untuk mencari kompromi jalan tengah, akan tetapi memberikan pemahaman obyektif yang mantap pada pihak-pihak yang bertikai, agar alam dan kehidupan memberikan peluang kesejahteraan yang lebih baik bagi manusia.

Agenda kegiatan ekonomi makro dan mikro harus ditinjau pada arena seluruh DAS yang mencakup potensi ekonomi daerah hulu di gunung sampai potensi ekonomi daerah hilir di laut. Secara berturut-turut potensi ekonominya akan semakin meningkat dari daerah hulu ke daerah laut, dan demikian pula kerumitan permasalahannya akan makin meningkat secara eksponensial apabila digeserkan dari hulu ke laut. Dengan demikian penanganan dan penyelesaian sumber permasalahan di hulu akan jauh lebih efektif dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar daripada sekedar pemecahan masalah-masalah turunannya di hilir. Demikian pula potensi ekonomi yang besar di daerah laut harus menjadi sasaran akhir penyelamatan potensi-potensi ekonomi di daerah hulunya.

Potensi ekonomi pantai laut selatan yang justru terpusat pada daerah kaya bentukan pantainya di daerah teluk-teluk Pangandaran, Parigi dan Penyu saat ini masih belum tergali secara optimal dan relatif belum tercemar. Hal ini tercapai berkat fungsi alamiah Laguna Sagara Anakan (LSA), baik sebagai wilayah penyangga maupun sebagai sumber produksi biologis (pembenihan).

Sodetan Citanduy akan menjadi ancaman serius bagi pemeliharaan maupun penggalian potensi di daerah laut yang sangat tinggi itu, karena LSA secara serta merta dikeluarkan dari keterkaitan *arena* DAS-nya. Demikian pula pengalihan masalah dari LSA ke laut akan menciptakan permasalahan di laut yang jauh lebih rumit dan mahal, khususnya di pusat potensi kekayaan lautnya di pantai Pangandaran, Parigi dan Penyu.

Pengelolaan DAS secara sektoral hanya di badan sungainya saja, atau hulunya saja, atau penggalian potensi ekonominya saja harus segera dikoreksi karena hanya akan menciptakan tindakan parsial yang mengabaikan berbagai keterkaitan yang seharusnya dibangun sebagai antisipasi kesinambungan.

Pengelolaan satu DAS seutuhnya harus dibangun kembali mulai dari wawasan hingga ke organisasi pelaksanaannya. Pelibatan multi sektor, multi *stakeholders*, banyak wilayah dan masyarakat setempat dengan kearifan lokalnya adalah kebutuhan mutlak untuk mengatasi tekanan berbagai kepentingan pada DAS yang semakin meningkat.

Satu pemahaman, perencanaan dan pengelolaan DAS Citanduy, LSA hingga perairan pantainya akan merupakan langkah manajemen yang paling ideal dan paling mungkin diterapkan. Langkah ini akan merupakan pelopor pembaharuan manajemen DAS yang akan menyertai gerakan reformasi Indonesia di segala bidang.

Demikian latar belakang dan alasan mengapa saya menolak rencana sodetan Citanduy. Saya sendiri sangat mengharapkan bahwa keputusan pembatalan sodetan Citanduy dapat disertai keputusan-keputusan strategis lainnya atas dasar *shared vision* dari multi *stakeholders* yang akan menjadikan DAS Citanduy berikut LSA lestari dengan segala potensinya, memberikan manfaat ekonomi yang besar pada setiap bagiannya, menjadi perekat dua propinsi dan banyak daerah otonomi administratif yang terkait secara alamiah.

Kasus G. Tampomas

Saat ini konsep penambangan bahan galian adalah *'jual murah gali habis'*, tidak berwawasan lingkungan dan tidak memikirkan *'reserve'* atau cadangan di masa datang demi anak cucu kita. Bahkan hampir semua lokasi penambangan ini berada di kawasan penyangga lingkungan sehingga kawasan lindung wilayah terancam rusak. Pengusaha tidak peduli, pemerintah tidak peka, menyebabkan kehancuran kawasan penyangga, hutan ditebang habis, tanah pasirnya juga digali habis, pada akhirnya rakyat sengsara.

G. Tampomas warisan alam Sumedang

Menurut para ahli, Gunung Tampomas diduga lahir pada jaman Kwarter (ribuan bahkan puluh ribuan tahun yang lalu), kemungkinan seumur dengan gunung Tangkuban Parahu, gunung Burangrang dan gunung Bukit Tunggul. Tidak ada catatan mengenai kejadian peristiwa-peristiwa letusan yang terjadi berikutnya hingga sekarang dari gunung Tampomas ini. Bentuknya yang khas sebagai gunung api tunggal kerucut menjadikan perhatian para ahli gunung api dunia dalam kegiatan *"Global Volcanism Program"*, dan gunung Tampomas ini dianggap sebagai warisan alam serta diberi nomor seri 0603-131 yang tercatat di *National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington DC 20013-7012*, Amerika Serikat.

Gunung Tampomas merupakan gunung kebanggaan Kabupaten Sumedang dengan ketinggiannya mencapai +1684 m di atas permukaan laut. Letaknya kurang lebih 10 km sebelah utara kota Sumedang dan dikelilingi 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjungkerta, Buahdua, Conggeang, Paseh, dan Cimalaka. Semua lahan di kecamatan tersebut memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, terbukti masyarakat di sekitar ini memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai dari hasil pertanian sawah, kebun dan wanatani.

Gunung Tampomas merupakan ujung dari gugusan pegunungan di Priangan, di sebelah timur dan utaranya merupakan dataran rendah yang menghampar luas,

meliputi sebagian Kabupaten Sumedang (4 kecamatan), Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kabupatan Cirebon, dan Kabupaten Karawang. Bila gunung ini dipandang dari arah daerah-daerah tersebut sungguh merupakan pemandangan alam yang menakjubkan. Bentuknya khas dan tingginya yang tak terhalang sehingga tampak sangat kontras dibanding dataran rendah di sekitarnya, sehingga para nelayan di pantai utara memfungsikannya sebagai kompas saat mereka menangkap ikan di laut Jawa.

G. Tampomas dan fungsi sosial ekonomi

Seperti kebanyakan gunung berapi di dunia, baik yang masih aktif ataupun yang tidak lagi aktif, gunung Tampomas pun mampu memerankan fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan yang besar bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Jumlah penduduk yang berdomisili sekitar gunung terdiri dari 5 kecamatan, identik dengan 60 desa adalah sebanyak 18,05% dari total penduduk Kabupaten Sumedang, sedangkan luas wilayahnya adalah 23,18% dari luas wilayah Kabupaten Sumedang. .

Dengan dukungan iklim yang sejuk, tanah yang subur, dan pengairan yang dipasok oleh sumber air yang handal dari puncak gunung dengan curah hujan lebih dari 3.500 mm/ tahun, maka sebagian besar penduduk di sekitar gunung Tampomas bermata pencaharian dari sektor pertanian, meliputi pertanian tanaman keras atau wanatani, sawah, hortikultura, peternakan, dan

perikanan. Hal ini terbukti walaupun luas wilayah ini hanya 23,18% dari total wilayah Kabupaten Sumedang, tetapi daerah ini menghasilkan produksi padi sebanyak 29,6% dan ikan 45,03% dari total produksi Kabupaten Sumedang.

Buah-buahan tropis yang dihasilkan merupakan sumber pendapatan yang potensial baik untuk masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Banyak sekali komoditas yang dihasilkan dari daerah ini, dan yang memiliki proporsi dominan adalah meliputi buah-buahan belimbing, jambu biji, nanas, pisang, rambutan, salak, sirsak, melinjo, dan petai. Bahkan melinjo telah berkembang menjadi bahan baku agroindustri emping yang sangat menjanjikan.

Berdasar Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 423/ KPTS/ Um/ 7/ 1979 tertanggal 5 Juli 1979, kawasan sekitar gunung Tampomas ini telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam, yang meliputi Kecamatan Buah Dua, Conggeang, Sindangkerta dan Cibeureum dengan luas sekitar 1.250 hektar. Iklim yang nyaman, potensi keanekaragaman hayati, pemandangan alam yang indah, beberapa situs budaya masa lalu, bekas kawah di puncak gunung merupakan unsur yang tak ternilai untuk pengembangan eko-wisata di tempat ini.

G. Tampomas dan sumber daya air

Gunung Tampomas memiliki potensi sumber daya air yang sangat melimpah. Air yang langsung dapat

dimanfaatkan masyarakat adalah danau alam, air panas, mata air, dan sungai. Danau alam dengan tingkat kejernihan yang tinggi berasal dari mata air yang terletak di Kecamatan Cimalaka (5 km dari kota Sumedang), dikenal dengan Danau Cipanteneun, berfungsi sebagai pemasok air PDAM Kota Sumedang dan sekitarnya, serta sebagai pemasok kebutuhan pertanian sawah, hortikultura, dan perikanan di daerah ini.

Kecamatan Paseh (13 km dari Kota Sumedang) memiliki danau alam yang dikenal dengan nama Danau Cipaingeun. Danau ini pun berfungsi sebagai sumber air untuk pertanian sawah, hortikultura, dan PDAM yang memasok penduduk di Kecamatan Paseh sendiri, Tomo dan Ujungjaya yang dikenal sebagai daerah kering di ujung Timur Kabupaten Sumedang.

Sumber air panas terletak di Kecamatan Buahdua, yaitu Ciputat dan Cileungsing. Sumber daya air panas ini merupakan potensi alam yang belum mampu diaktualkan secara optimal untuk kepentingan daerah, sehingga diperlukan uluran tangan investor untuk mengelola sumber alam yang tak ternilai ini.

Mata air tersebar di seluruh kaki gunung ini yang digunakan masyarakat untuk kepentingan sumber air keluarga, pertanian dan perikanan, mata air ini yang berdebit besar dan kecil. Mata air yang berkategori debit besar meliputi mata air Cioray, Ciburial, Cikurubuk atau Cilumping, Narimbang.

Sedangkan keberadaan sungai, tergantung dari banyaknya mata air, sumber air panas, dan danau alam. Maka sumber daya tersebut menjadi terakumulasi dan menyatu dalam suatu drainase alam yang secara konsisten mengalirkan air dari hulu ke hilir sambil membawa berjuta manfaat dan disebut sungai. Sungai yang dialirkan dari Gunung Tampomas nyaris tak terhitung yang meliputi sungai kecil dan besar, mengalir dengan konsisten ke seluruh penjuru, dan merupakan drainase alam serta sumber penghidupan masyarakat.

Aliran sungai-sungai kecil yang mengalir dari sebelah barat, selatan, dan tenggara kaki gunung ini terakumulasi di Sungai Cipeles. Sedangkan aliran sungai di sebelah timur diakumulasikan pada Sungai Cipelang. Akhirnya, baik Sungai Cipeles, maupun Cipelang bermuara di Sungai Cimanuk di Kecamatan Tomo dan Ujungjaya. Sedangkan sungai-sungai kecil di sebelah utara gunung ini terakumulasi pada Sungai Cipunagara.

G. Tampomas dan sumber daya hutan

Hutan adalah kumpulan tegakan pohon yang didukung dengan semak-semak dan membentuk ekosistem. Hutan telah memerankan fungsi hidro-orologis di sekitar Gunung Tampomas secara sempurna. Namun tegakan pohon bukan hanya dibangun dalam sebuah hutan negara, melainkan tegakan pohon tanaman keras sebagai penghasil buah-buahan milik masyarakat pun mampu memerankan fungsi hidro-orologis yang baik. Bedanya adalah hutan produksi komoditasnya kayu, sedangkan

komoditas tanaman keras rakyat adalah buahnya, sehingga gunung ini merupakan reservoir dan pemasok air yang besar untuk kepentingan kehidupan penduduk masyarakat Kabupaten Sumedang.

Namun keadaan saat ini telah mengalami penurunan baik kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini terbukti bahwa luas hutan negara di sekitar Gunung Tampomas adalah 3.478,50 hektare dan 2.474,70 hektare untuk tahun 2002 dan 2003, dengan kata lain terdapat degradasi sebesar 28,85% dalam satu tahun.

Lokasi hutan negara terletak pada ketinggian gunung yang merupakan daerah tangkapan air yang paling efektif. Jika luas hutan negara telah mengalami penurunan, hal itu akan berakibat berkurangnya daerah tangkapan dan resapan air di gunung tersebut. Hubungan antara tegakan pohon hutan negara dengan tegakan pohon tanaman keras milik rakyat sangatlah erat, yaitu hutan negara sebagai daerah tangkapan dan resapan air yang efektif, untuk dimanfaatkan airnya oleh tegakan pohon-pohon tanaman keras milik rakyat yang terletak di kaki gunung sebagai penghasil buah-buahan. Sungguh, ini merupakan harmoni alami yang sangat mengesankan.

Namun, hutan negara jika setiap tahun mengalami penurunan sebesar 28,85% niscaya dalam waktu 5 tahun mendatang hutan Gunung Tampomas hanya tinggal kenangan. Dia niscaya tak akan mampu lagi mengeluarkan air yang cukup dan air akan menjadi komoditas langka dan mahal, sehingga nilai kehidupan masyarakat akan terancam.

Galian C dan kehancuran ekosistem

Gunung Tampomas telah memberi manfaat bagi masyarakat. Selain manfaat yang berasal dari atas permukaan tanah *(top soil)* juga terdapat kekayaan di dalam tanah berupa deposit tambang pasir dan batu (split) yang sangat melimpah ruah. Semua telah dieksploitasi secara intensif dengan melibatkan para investor besar, sehingga telah berkontribusi dalam pembangunan fisik, baik projek pemerintah, swasta maupun perseorangan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sumedang, Kota dan Kabupaten Bandung, Majalengka, Cimahi, Subang, Indramayu, bahkan digunakan untuk reklamasi projek-projek prestise di Jakarta.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas PLH Kabupaten Sumedang, terdapat 2 kecamatan dengan 8 lokasi penambangan pasir dan split dengan total areal kurang lebih 306,43 hektar, yaitu: Kecamatan Cimalaka (Licin, Cibeureum Kulon, Cibeureum Wetan, Citimun, Naluk, Mandalaherang), dan Kecamatan Paseh (Paseh Kaler, Legok Kaler).

Bisnis yang menggiurkan tersebut dikelola oleh beberapa badan usaha, dan usaha perseorangan yang telah memiliki izin konsesi. Kegiatan eksploitasi besar-besaran pada lokasi tersebut bekerja tanpa henti siang dan malam, dan diangkut dengan ribuan trip per hari, baik yang menggunakan truk tipe tronton maupun truk

tipe ringan *(light truck)*. Dengan kata lain, volume pasir yang mampu diangkat dan diangkut bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu meter kubik dalam sehari semalam.

Namun, seimbangkah hasil yang diperoleh Pemkab Sumedang dan masyarakat bila dibandingkan dengan dampak negatif yang ditimbulkannya? Jika kita coba untuk membandingkan dampak yang ditimbulkan antara perusakan hutan dengan penggalian pasir, perusakan hutan merupakan tindakan yang merugikan, tetapi kegiatan penggalian pasir pun dampaknya jauh lebih berbahaya.

Jika Tampomas tidak segera diselamatkan, perlahan tapi pasti niscaya akan menjadi sebuah gunung yang tak memiliki fungsi hidro-orologis yang sempurna. Sistem flora dan fauna yang bermanfaat bagi kehidupan penduduk akan berubah fungsi dan tak kurang Tampomas menjadi sebuah gunung yang tak lagi memberi manfaat, bahkan bisa menimbulkan bencana yang tak terperikan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa penurunan fungsi dari ekosistem di antaranya: tanah longsor, banjir bandang, hilangnya mata air andalan (misalnya: Ciburial, Cibuntu, Cipaingan, dll), bencana kekeringan, hilangnya sistem flora dan fauna, tingginya suhu udara, akhirnya akan menurunkan tingkat mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Pemerintah kabupaten Sumedang pihak yang paling bertanggung jawab dalam menyelamatkan Tampomas, karena gunung ini selain menjadi simbol alam

Sumedang, juga telah mampu berperan secara konsisten dalam memberi nafkah bagi masyarakat sekitarnya, baik saat di masa lalu, masa sekarang, dan tentunya di masa yang akan datang bagi anak dan cucu kita.

Bangkitnya kesadaran masyarakat

Agar semua itu bisa kita capai, diperlukan upaya konsisten untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dengan sosialisasi hal-hal antara lain sebagai berikut:

a. Untuk mencegah perusakan lingkungan maka diperlukan manajemen lingkungan hidup yang konsisten di antaranya diperlukan pengawasan oleh aparat Pemerintah Kabupaten Sumedang, namun pemerintah daerah pun memerlukan bantuan dari mitranya yaitu DPRD. Sudah sampai mana tugas ini mampu diperankan DPRD Kabupaten Sumedang khususnya Komisi D?
b. Tidak layakkah perusakan lingkungan ini dinyatakan sebagai sebuah kejadian yang luar biasa, sehingga diperlukan pembentukan pansus di DPRD? Ataukah Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah tak berdaya untuk menyelamatkan lingkungan hidup di wilayahnya?
c. Jika demikian, mengapa Tampomas tidak diangkat ke tingkat pusat untuk dijadikan taman nasional, agar Sumedang terhindar dari kewajiban finansial.
d. Pendahulu *(karuhun)* Sumedang sangat peduli terhadap lingkungan dan tak terhitung bukti-bukti aksi peninggalannya. Masalah sekarang adalah, "Mana aksi peduli lingkungan yang nyata dari

generasi penerus, padahal saat ini Sumedang telah berumur 427 tahun?"

e. Kita sependapat bahwa Gunung Tampomas kini memiliki kandungan sumber daya air yang melimpah yang dicirikan dengan banyaknya mata air yang keluar dari sekitar kaki gunung tersebut, tugas kita adalah bagaimana agar Tampomas sebagai sumber "mata air", tidak berubah menjadi sumber "air mata" di masa yang akan datang. *No forest, no water, no future, leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak.*

Kenyataan di lapangan galian pasir sudah sedemikian meluas hingga lebih dari 400 ha dan mencapai kedalaman lebih dari 20 meter bahkan lebih, serta masih dalam keadaan terus berkembang hingga sekarang.

Hal ini telah memberikan dampak langsung yang sangat nyata berupa hilangnya puluhan mata air besar dan kecil sehingga penyediaan air menjadi sulit, kehancuran iklim mikro setempat, udara terasa sangat panas, kehidupan sehari-hari yang biasanya ditunjang oleh kegiatan tani beragam menjadi susah, dan muncul kehawatiran akan tibanya bencana alam serta masa depan kehidupan yang suram.

Dari waktu ke waktu kesadaran masyarakat akan rusaknya lingkungan tersebut perlu semakin diperkuat dan diperluas, meliputi baik masyarakat sekitar lokasi penambangan, maupun masyarakat yang jauh berada di luar lokasi, bahkan juga bagi mereka yang sehari-hari terkait langsung dengan usaha kegiatan penggalian pasir

itu sendiri, sehingga permasalahan ini harus direspon dengan pilihan solusi yang jelas, nyata dan tuntas.

Kesadaran masyarakat di atas tidak boleh ditumpas, bahkan harus dikuatkan agar menjadi motivasi dan inisiatif masyarakat untuk memulihkan kondisi alam lingkungannya yang sudah sangat mengkhawatirkan.

Memperhatikan desakan masyarakat untuk segera dilakukan tindak nyata menyelamatkan G. Tampomas dari kehancuran akibat ulah manusia ini, ternyata para tokoh, sesepuh telah memberikan aspirasinya yang ditujukan kepada Bupati Sumedang sebagai berikut:

1) Meminta agar kegiatan galian pasir di G. Tampomas dapat segera dihentikan dengan kekuatan hukum yang jelas, karena masyarakat setempat secara tegas sudah menyatakan ketidaksukaannya (*teu beuki)* atas galian pasir yang terjadi, sementara para tokoh dan sesepuh Sumedang dan Jawa Barat sangat mengkhawatirkan masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakatnya.
2) Segera memulihkan kembali kondisi alam di seputar G. Tampomas dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai peran utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya, melalui suatu forum aspiratif yang disepakati oleh masyarakat di seputar G. Tampomas.
3) Mendesak agar dilakukan penguasaan kembali lahan bekas galian yang dinilai penting untuk kepentingan umum oleh pihak pemerintah untuk dikelola lebih lanjut dengan peran utama masyarakat seperti tersebut di atas.

4) Mengembangkan kegiatan wisata alam dan wanatani yang sesuai dengan kekhasan alam serta kearifan budaya setempat dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
5) Sangat mengharapkan upaya pemulihan kondisi alam di G. Tampomas bisa dilaksanakan secara berpercepatan, sehingga manfaatnya bukan saja dapat dirasakan di seputar G. Tampomas melainkan juga oleh masyarakat di sepanjang Daerah Aliran Sungai yang bersumber dari G. Tampomas.

Kasus Astanajapura

Astanajapura sebagai kawasan penyangga

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 2 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, disebutkan bahwa Kabupaten Cirebon harus memiliki kawasan lindung regional seluas 5% dari seluruh luas Kabupaten dan lokasinya berada di bagian selatan. Secara topografi merupakan kaki Gunung Ciremay, secara geologi batuannya terdiri dari “volcanic product” yang sangat subur, dan secara kewilayahan berada di Kecamatan-Kecamatan Dukupuntang, Sumber, Cirebon Selatan, Mundu, Astanajapura, Beber, Sedong, Lemahabang, dan sekitarnya. Berdasar kemiringan lereng, jenis tanah dan curah hujan rata-rata, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah tepat dalam menetapkan bahwa wilayah-wilayah ini merupakan kawasan lindung Kabupaten Cirebon. Yang

dimaksudkan dengan kawasan lindung adalah: kawasan di darat, di pesisir dan di laut yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa, sebagai pendukung utama kehidupan yang berkelanjutan.

Fungsi sosial ekonomi kaki G. Ciremay

Seperti kebanyakan gunung berapi di dunia, baik yang masih aktif maupun yang tidak lagi aktif, gunung Ciremay pun mampu memerankan fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan yang besar bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Walaupun Kabupaten Cirebon hanya mendapatkan bagian lereng kaki Gunung Ciremay, namun bila bagian wilayah ini benar-benar difungsikan sebagai kawasan lindung atau kawasan penyangga sesuai amanah Perda Provinsi No. 2 tahun 2003 tentang RTRW, maka Kabupaten dan Kota Cirebon akan selamat dari ancaman bencana lingkungan.

Dengan dukungan iklim lereng gunung yang sesuai, tanah yang subur, dan potensi sumberdaya air yang cukup, maka sebagian besar penduduk di sekitar lereng kaki Gunung Ciremai ini bermata pencaharian dari sektor pertanian, meliputi pertanian tanaman keras atau wanatani (*agroforest*), sawah, hortikultura, peternakan, dan perikanan.

Buah-buahan tropis yang dihasilkan merupakan sumber pendapatan yang potensial baik untuk masyarakat

maupun pemerintah daerah setempat. Banyak sekali komoditas yang dihasilkan dari daerah ini, dan yang memiliki proporsi dominan adalah buah-buahan, bahkan mangga telah menjadi komoditas andalan bagi wilayah ini.

Potensi Gunung Ciremay sebagai generator alam yang menjaga keberlanjutan kehidupan di puncak dan lereng-lereng kaki gunung, telah mendorong Menteri Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan No. 424/ Menhut-II/2004 tertanggal 19 Oktober 2004 yang menetapkan Gunung Ciremay sebagai Taman Nasional dan dideklarasikan pada tanggal 14 Juli 2005. Dampak Taman Nasional ini sangat diharapkan akan menambah potensi lereng-lereng kaki Gunung Ciremay, termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Cirebon, menjadi lebih berfungsi sebagai kawasan lindung atau kawasan penyangga yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kaki G. Ciremay dan sumber daya air

Kabupaten Cirebon sebenarnya memiliki potensi sumberdaya air yang dapat mencukupi untuk kehidupan masyarakatnya. Terdapat banyak sungai-sungai yang bermataair di Gunung Ciremai, kemudian mengalir ke Kabupaten Cirebon melalui beberapa Daerah Aliran Sungai (DAS) antara lain: Ciwaringin, Cimanggung, Bangkaderes, Jurangjero, Cisanggarung. Beberapa situ yang ada, antara lain yang terbesar adalah Situ Patok, bila dikelola dengan baik merupakan aset alam yang

menambah potensi sumberdaya air kabupaten Cirebon. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa minimum 30% dari luas DAS harus berupa hutan untuk menjaga potensi sumberdaya air menjadi stabil dan terkendali. Namun fakta yang terjadi, bila musim penghujan Kabupaten Cirebon kebanjiran dan bila musim kemarau mengalami kekeringan, karena telah terjadi degradasi lingkungan yang melampaui batas.

Penambangan melampaui batas

Lereng kaki Gunung Ciremay di Kabupaten Cirebon bagian selatan bila dikelola dengan konsep wanatani (agroforest) sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penambangan bahan galian C dengan cara tradisional dan skala kecil masih bisa ditolerir, sebab kedalaman penambangan dan luasannya yang tidak seberapa, sehingga akan mudah direklamasi. Namun yang terjadi saat ini adalah penambangan dengan alat-alat berat secara besar-besaran. Luasan dan kedalaman galian yang terjadi telah sedemikian melampaui batas. Seluruh kawasan lindung Kabupaten Cirebon yang luasnya 5% dari luas Kabupaten, atau kurang lebih 5.000 hektar, saat ini terancam menjadi kawasan penambangan bahan galian C yang tidak hanya berbasis perekonomian jangka pendek namun juga tidak berwawasan lingkungan dan menghancurkan masa depan Kabupaten Cirebon dan sekitarnya.

Kegiatan eksploitasi galian C secara besar-besaran pada lokasi tersebut yang bekerja tanpa henti siang dan malam, dan diangkut dengan ribuan trip perhari, baik yang menggunakan truk tipe biasa maupun truk tipe tronton. Volume pasir yang mampu diangkat dan diangkut bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu meter kubik dalam sehari semalam.

Berdasar kenampakan di lapangan, apalagi bila dihitung secara ekonomi lingkungan, hasil yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Cirebon, apalagi masyarakat setempatnya, sangat tidak seimbang bila dibandingkan dengan dampak negatif yang ditimbulkan, bahkan mengancam kehidupan berlanjutan di masa depan.

Kehancuran Kabupaten Cirebon

Jika kawasan lindung Kabupaten Cirebon tidak segera diselamatkan, cepat atau lambat niscaya siklus eko-hidrologi dan iklim mikro akan hancur, sistem flora dan fauna yang bermanfaat bagi kehidupan akan lenyap dan akan muncul bencana dahsyat yang beruntun, misalnya: banjir bandang, peningkatan suhu secara ekstrim, kekeringan dan berbagai macam penyakit.

Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kehancuran kawasan lindung ini akibat penambangan bahan galian C secara brutal. Penambangan dengan alat-alat berat harus segera dihentikan. Kawasan lindung yang berupa lereng kaki Gunung Ciremai ini harus segera diselamatkan karena

selain menjadi simbol alam Kabupaten Cirebon, juga mampu berperan secara berkelanjutan dalam memberi nafkah bagi masyarakat sekitarnya, baik di masa lalu, masa sekarang, dan tentunya di masa yang akan datang bagi anak dan cucu.

Berapa kerugian Astanajapura?

Unsur lingkungan Astanajapura

- Lahan 318 hektar, terdiri dari 200 hektar sawah dan 100 hektar kebun/ wanatani, 18 hektar dalam bentuk lain, telah digali sedalam 20 m sampai 50 meter.
- Bangunan terancam lingkungannya (terancam longsor) 453 unit rumah, 6 unit mushola, 2 unit sekolah dasar.
- Sumur mata air yang menjadi kering 37 buah, sebagai sumber air untuk 500 kk (kepala keluarga).
- Kerugian waktu diasumsi 30 tahun, dengan perincian 10 tahun hilang waktu karena perusakan akibat penambangan galian C, 10 tahun berikutnya adalah waktu untuk reklamasi (dengan catatan dipastikan tidak akan kembali seperti semula, karena tingkat kesuburan dan kandungan mineral yang hilang), 10 tahun kemudian sebagai awal untuk memulai kembali kehidupan wanatani sesuai tata ruang. Jadi jumlah kerugian waktu 30 tahun.

Taksiran kerugian nilai ekonomi lingkungan

1) **Kebun/ wanatani 100 hektar**

   a) **Nilai guna langsung**

      - Potensi kebun mangga dan buah-buahan lainnya (duren) 75 hektar @ 200 pohon @ 200 kg/ tahun @ Rp 5.000/ kg
        = 75 x 200 x 200 x Rp 5.000
        = Rp 15.000.000.000/ tahun.
        Kerugian waktu 30 tahun, maka jumlah
        = Rp 15.000.000.000 x 30 tahun
        = **Rp 450.000.000.000**
      - Potensi tanaman kayu keras (suren, dan lain-lain) 25 hektar @ 400 pohon @ 3 m3/ 10 tahun @ Rp 500.000/ m3
        = 25 x 400 x 3 x Rp 500.000
        = Rp 15.000.000.000
        Kerugian waktu 30 tahun (3 kali panen), maka jumlah
        = **Rp 45.000.000.000**
      - Potensi tumpang sari tanaman kebutuhan sehari-hari 500 kk @ Rp 5.000/ hari
        = 500 kk x Rp 5.000/ hari x 365 hari x 30 tahun
        = Rp 27.375.000.000
      - Potensi kayu bakar untuk keperluan rumah tangga, diasumsikan separuh jumlah kk menggunakan kayu bakar, setara 2 liter minyak tanah = Rp 3.000/ hari
        = 1/2 x 500 kk x Rp 3.000 x 365 hari x 30 tahun
        = Rp 8.212.500.000

b) Nilai guna tidak langsung

- Fungsi pengendalian banjir, longsor:
  Dampak kepada 200 hektar lahan di bawahnya = 200 hektar @ Rp 3.614.000 (harga satuan mengacu kepada West Java Province Environmental Strategy / WJPES, BPLHD Provinsi Jawa Barat, 2004)
  = 200 x Rp 3.614.000 x 30 tahun
  = Rp 21.684.000.000
- Fungsi pengendalian erosi:
  Lahan pelindung erosi di kawasan kebun/ wanatani 100 hektar @ Rp 113.000 (harga satuan mengacu kepada West Java Province Environmental Strategy, BPLHD Provinsi Jawa Barat, 2004)
  = 100 x Rp 113.000 x 30 tahun
  = Rp 339.000.000
- Fungsi ekowisata:
  Berdasar perhitungan WJPES, BPLHD Provinsi Jawa Barat, 2004 nilai wisata hutan Rp. 2.239.625.000.000/ tahun dengan luas hutan Jawa Barat 800.000 hektar, maka potensi 100 hektar wanatani Astanajapura
  = (100/ 800.000) x Rp 2.239.625.000.000/ tahun x 30 tahun
  = Rp 8.398.593.750

c) Nilai pilihan

- Fungsi penyerapan karbon:
  Berdasar perhitungan WJPES, BPLHD Provinsi Jawa Barat, 2004, akibat kerusakan hutan (sekunder), maka karbon yang bebas ke

udara sekitar 100 ton CO2/ hektar, maka potensi 100 hektar wanatani Astanajapura
= 100 hektar x 100 ton CO2/ tahun x harga satuan US$ 5/ ton
= 100 x 100 x 5 x Rp 10.000 x 30 tahun
= Rp 15.000.000.000

d) **Nilai keberadaan**

- Flora dan fauna:
  Berdasar perhitungan WJPES, BPLHD Provinsi Jawa Barat, 2004, harga satuan untuk nilai fauna dan flora Rp 37.700.000/ ha/ tahun. Dari 100 hektar kawasan wanatani Astanajapura, diasumsikan 10% yang harus dikonservasi sebagai penyangga utama, maka nilainya
  = 100 x 10% x Rp 37.700.000 x 30 tahun
  = Rp 11.310.000.000

2) **Nilai sumber daya air**

Berdasar perhitungan WJPES, BPLHD Provinsi Jawa Barat, 2004, nilai ekonomi sumberdaya air Jawa Barat merupakan gabungan nilai guna langsung, nilai guna tidak langsung, nilai pilihan dan nilai keberadaan Rp 24.750.000.000.000/ tahun dengan luas Jawa Barat 3,7 juta hektar.
Untuk Astanajapura 318 hektar bernilai
= (318/3.700.000) x Rp 24.750.000.000.000 x 30 tahun **= Rp 63.814.864.864**

3) **Nilai sawah 200 hektar**
   Potensi sawah seluas 200 hektar dengan pola tanam padi intensif menghasilkan gabah kering pungut 8 ton/ hektar/ panen dengan harga Rp 2.500, maka nilainya
   = 200 hektar x 8.000 x 3 kali panen/ tahun x Rp 2.500 x 30 tahun
   = Rp 360.000.000.000

4) **Nilai kehilangan bentang alam dan kesuburan tanah**
   Tidak mungkin bentang alam dan kesuburan tanah ini tergantikan. Kandungan mineral dalam tanah sebagai hasil gunung api Ciremai yang membuat tanah setempat menjadi subur tidak dapat diganti dengan pasir/ lumpur laut yang mengandung garam.
   Bentang alam yang hilang sebanyak
   = luas 318 hektar x kedalaman 20 m sampai 50 m (rata-rata 35 m)
   = 3.180.000 m2 x 35 m x harga pasir di pasar Rp 50.000/ m3
   = **Rp 5.565.000.000.000**

5) **Nilai yang sangat berharga dan tidak dapat dinilai dengan uang**
   Aspek sosial, kultural dan religi:
   Manfaat keberadaan kawasan lindung Astanajapura sangat besar dan tidak bisa dinilai dengan uang. Ini adalah nilai sosial, kultural dan religi yang berkaitan dengan keberlanjutan kehidupan masyarakat setempat.

6) **Total kerugian: Rp 6.568.575.358.614**
   Enam setengah trilyun rupiah lebih, itupun baru di Astanajapura, belum lagi seluruh kerusakan akibat galian C yang terjadi di Kabupaten Cirebon.

Keberanian rakyat versus perusak lingkungan

Masyarakat di sekitar lokasi penambangan bahan galian C telah sedemikan menderita dan sengsara. Deru mesin *backhoe* dan *truck-truck* besar serta debu yang beterbangan telah menjadi suasana sehari-hari. Galian telah sedemikian dekat dari rumah warga dan mengancam keamanan penghuninya. Hal ini telah memberikan dampak langsung yang sangat nyata berupa hilangnya puluhan mata air besar dan kecil sehingga penyediaan air menjadi sulit, kehancuran iklim mikro setempat, udara terasa sangat panas, kehidupan sehari-hari yang biasanya ditunjang oleh kegiatan tani beragam menjadi susah, dan muncul kehawatiran akan tibanya bencana alam serta masa depan kehidupan yang suram. Perasaan tertekan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari warga. Setiap warga yang berusaha protes langsung mendapat intimidasi dari preman-preman yang disewa oleh pengusaha galian. Setiap kali masyarakat menyampaikan aspirasinya, Pemerintah Kabupaten selalu hanya bersandiwara dengan janji akan menutup kegiatan penambangan, padahal kenyataannya kegiatan penambangan berjalan terus.

Ibarat pepatah, semutpun bila diinjak juga akan berontak, maka kesadaran dan keberanian masyarakat mulai

tumbuh. Dari waktu ke waktu kesadaran masyarakat akan rusaknya lingkungan tersebut semakin terasa menguat dan meluas, meliputi baik masyarakat di sekitar lokasi penambangan, maupun masyarakat yang jauh berada di luar lokasi. Warga telah mampu bersatu, berkoordinasi menuntut ditutupnya penambangan bahan galian C yang akan menghancurkan kehidupan masa depannya.

Intervensi dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup yang membenarkan bahwa penambangan galian C di Astanajapura melampaui batas, telah meningkatkan keberanian masyarakat dalam menuntut percepatan penutupan kegiatan penambangan.

Akhirnya perjuangan masyarakat Astanajapura ini berhasil. Pemerintah Kabupaten Cirebon menutup komplek penambangan galian C di Astanajapura. Sementara ini para pengusaha menyingkir dari Astanajapura, mencari kawasan penambangan lain sambil terus menyebar intrik karena masih berkeinginan membuka kembali daerah pertambangannya di Astanajapura.

Sebenarnya penutupan kawasan pertambangan galian C tidak cukup hanya di Astanajapura saja, tetapi seluruh kaki G. Ciremay harus berfungsi kembali menjadi kawasan lindung, tidak boleh ada penambangan galian C. Pembangunan yang menggunakan batu, pasir dan kerikil, misalnya untuk jalan tol, harus sudah mulai dengan paradigma teknologi baru sehingga tidak perlu menghancurkan gunung dan bukit kawasan lindung.

Langkah-langkah pemulihan lingkungan

- Perlu dilakukan audit lingkungan oleh pihak independen dengan dibiayai oleh pemerintah propinsi/ kabupaten untuk dapat menghitung secara seksama kerusakan lingkungan yang telah terjadi, serta mengidentifikasi penyelewengan lingkungan, tata ruang dan perijinan yang terjadi.
- Memberikan sanksi hukum kepada mereka yang melakukan penyelewengan-penyelewengan berkaitan dengan penambangan bahan galian C dengan tidak pandang bulu, baik birokrat, aparat, pengusaha maupun warga terkait.
- Menghentikan dengan segera penggalian pasir yang masih aktif dan menggunakan peralatan berat, sehingga percepatan perusakan yang tidak terkendali dapat dihentikan.
- Penambangan skala rakyat dengan cara tradisional perlu dipikirkan untuk tetap diijinkan sejauh tidak merusak lingkungan. Konsep bina manusia, bina lingkungan dan bina usaha diterapkan antara lain dengan membentuk koperasi rakyat, sehingga keseimbangan antara kecepatan penggalian dan upaya pemulihan lahan bisa diterapkan secara seksama dan mata pencaharian rakyat setempat yang bergantung pada pengusahaan pasir masih dapat dipertahankan.
- Dilakukan penataan kembali penguasaan lahan yang rusak dan pengorganisasian kembali kegiatan sehari-hari masyarakat dikaitkan dengan upaya rehabilitasi

lahan agar kegiatan wanatani (agroforest) yang telah teruji bisa menjadi basis kehidupan rakyat setempat dapat dipulihkan dan kembali dinikmati manfaatnya secara luas.

KASUS PUNCLUT

Bandung Utara sebagai Kawasan Lindung

Kawasan Bandung Utara adalah kawasan di utara Cekungan Bandung pada ketinggian diatas 750 m dpl seluas 38.548 ha yang mencakup sebagian wilayah administrasi Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Berdasarkan beberapa Surat Keputusan Presiden, Menteri, Gubernur, dan Peraturan Daerah kawasan ini merupakan lahan konservasi dan berfungsi untuk melindungi kawasan di bawahnya yaitu Cekungan Bandung. Peraturan-peraturan tersebut antara lain: Keppres Nomor 32/1990, Kepmen LH Nomor Kep-35/MENLH/12/1998, SK Gubernur Jabar Nomor 191.1/1982 tentang Bandung Utara sebagai Lahan Konservasi, dan Perda Propinsi Jabar Nomor 2/2003 tentang RTRW Propinsi Jawa Barat. Tidak efektifnya peraturan perundangan di atas menyebabkan saat ini 70% luas kawasan tersebut dalam kondisi rusak, dan cenderung masih bertambah rusak. Peraturan yang sudah benar perlu dikuatkan, yang belum ada segera dibuat, dan kebijakan yang salah perlu dikoreksi, sehingga penegakkan aturan di lapangan dapat menjadi kenyataan. Wacana terbuka untuk membahas hal ini

akan menjadi langkah pembelajaran yang baik untuk semua pihak.

Punclut dari masalah ke masalah

Kawasan Punclut sendiri merupakan lahan di Kawasan Bandung Utara seluas 268 ha di wilayah administrasi Kota Bandung, dikuasai oleh beberapa pengusaha pengembang dan dihuni oleh beberapa pemilik dan penggarap lahan (lk 2419 KK). PT Dam Utama Sakti Prima (DUSP) menguasai Lahan Punclut seluas 248h (meliputi 68 ha di wilayah Kota Bandung dan 80 ha di Kabupaten Bandung), PT Mulia Sejati 20,5 ha dan PT Trigana 0,9 ha.

Permasalahan Punclut muncul karena ketidakpahaman tentang konsepsi kawasan lindung dengan segala implikasinya. Bentuk ketidakpahaman ini memicu perdebatan luas justru ketika dikemukakan oleh para pejabat yang berwenang karena membentur pemahaman publik yang sudah merupakan kearifan budaya atau peraturan perundangan yang sudah disepakati. Padahal penataan di kawasan ini menjadi sangat penting karena akan merupakan *entry point* bagi penataan Kawasan Bandung Utara secara keseluruhan.

Berdasarkan sejarahnya, tanah Punclut terdiri dari tanah adat, tanah bekas *erfpacht* dan tanah milik rakyat. Pada tahun 1961, pemerintah melalui Menteri Muda Agraria Mr. Soedjarwo dengan SK no. 27/KA/61 memberikan sebagian tanah bekas *erfpacht* untuk dimiliki oleh para

ex-pejoang kemerdekaan dan mereka yang telah berjasa bagi negara karena pada waktu itu mereka tidak sempat memikirkan rumah kediaman milik sendiri. Kemudian antara tahun 1961-1963 dilakukan pendaftaran permohonan hak dan penerbitan 943 SHM seluas total 84,21 ha untuk para ex-pejoang kemerdekaan, namun tidak gratis tetapi mengharuskan para penerimanya membayar biaya-biaya yang ditetapkan kepada pemerintah.

Pada perkembangan selanjutnya para pemilik kapling tidak membangun rumah di sana karena adanya SK Gubernur Jabar No. 181.1/SK.1624-Bapp/1982 yang membatasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara. Namun pada tahun 1997 Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Soni Harsono secara sepihak membatalkan 943 SHM tersebut dengan alasan tidak dibangun oleh pemiliknya. Di sisi lain Menteri memberikan ”perlakuan khusus” untuk meneruskan pembangunan kepada PT DUSP yang waktu itu sudah mempunyai ijin lokasi. Atas pembatalan hak atas tanah yang diduga penuh rekayasa, setidaknya 60 orang pemilik SHM telah melayangkan gugatan ke PTUN, bahkan sebagian kasusnya sudah dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung.

Pada tanggal 18 Desember 2004 dengan berdasarkan SK Menteri Muda Agraria tahun 1961 beberapa pemilik tanah Punclut mendeklarasikan berdirinya Keluarga Pecinta Punclut (KPP) yang bertujuan memperjuangkan kembalinya hak kepemilikan tanah yang dibatalkan sepihak oleh Menteri Negara Agraria Soni Harsono tahun 1997. Latar belakang pendirian KPP juga

didasarkan atas terinjaknya rasa kehormatan para pejoang kemerdekaan 1945 oleh oknum pemerintahan yang berkolusi dengan pihak pengembang yang serakah. KPP bertekad untuk melindungi alam cekungan Bandung dari praktek pembangunan di Punclut yang merusak lingkungan dan semata hanya mementingkan aspek bisnis komersial. Lebih lanjut, melalui lembaga berbadan hukum Yayasan Pemerhati kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (YPKLTS), telah diajukan gugatan Legal Standing yaitu hak gugat LSM seperti yang terkandung dalam UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Tata Kota, Walikota Bandung dan PT DAM Utama Sakti ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dengan No.14/G.TUN/2005/PTUN pada bulan Februari 2005, Junto No. 32/B/2006/PT.TUN Jakarta. Adapun substansi yang digugat adalah Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada pengembang PT DUSP.yang bertentangan dengan Perda Kota Bandung Nomor 2 tahun 2004 yang intinya menetapkan kawasan Punclut sebagai kawasan lindung. Perjuangan menyelamatkan kawasan lindung Punclut melalui jalur hukum yang berlaku ini terus dilakukan oleh kelompok-kelompok pemerhati lingkungan. Saat ini proses tersebut dalam pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

Episode penghancuran kawasan lindung Punclut rupanya tidak hanya berhenti di situ. Pemerintah Kota Bandung kemudian mengesahkan Perda Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) No. 2 tahun 2004 yang intinya merubah sebagian peruntukan kawasan lindung Punclut

menjadi kawasan budidaya untuk kepentingan pengembang tertentu. Beberapa upaya advokasi lingkungan telah dilakukan oleh kelompok-kelompok pemerhati lingkungan untuk menolak perubahan Perda tersebut, seperti audiensi dengan DPRD Kota Bandung bahkan sampai turun ke jalan baik di Bandung maupun di Jakarta. Perjuangan atas kasus Punclut ini akan terus berlanjut karena selain menyangkut fungsi kelestarian Kawasan Bandung Utara juga menyangkut kehormatan sebagai pejuang angkatan ’45.

3

MENGANGKAT DERAJAT RAKYAT MENUJU KEMANDIRIAN BANGSA

“Back to basic, balik ka pamiangan”

Pengelolaan sumber daya alam yang telah menyeleweng dari akidah konservasi dan tidak berkelanjutan telah berakumulasi menyebabkan **bencana lingkungan** yang berkembang menjadi **bencana ekonomi** dan **bencana sosial.** Pada akhirnya maka rakyat-lah yang akan menjadi pelengkap penderita.

Bencana ekonomi telah dirasakan, karena banyak kebijakan ekonomi yang jelas-jelas melanggar ketentuan-ketentuan alam. Misalnya, menggali batu dan pasir secara berlebihan di kawasan lindung, menambang

pasir besi di pantai yang mengakibatkan abrasi, illegal logging, bertani kentang sampai ke puncak gunung, yang kesemuanya tersebut hanya menguntungkan ekonomi jangka pendek, tetapi menghapus harapan masa depan.

Kenaikan harga BBM yang besar dan tiba-tiba beberapa waktu yang lalu, sementara rakyatnya tidak disiapkan terlebih dahulu, telah menimbulkan gejolak yang membuat rakyat lebih menderita. Bahwa alasan karena pengaruh turbulensi pasar global bisa dimaklumi, bahwa telah diambil kebijakan yang tidak populis juga bisa dimaklumi. Strateginya bisa saja benar, tetapi pelaksanaan di lapangan **very poor**, karena tidak menyiapkan bahan bakar alternatif, sosialisasi tidak efektif, para penyelundup dan penyeleweng tidak ditangkap terlebih dahulu, malah seterusnya membagi-bagi uang secara langsung yang tidak mendidik, bahkan membunuh kreativitas rakyat.

Banyak lagi kebijakan ekonomi lain yang saat ini lebih berpihak kepada ekonomi pasar global dari pada berpihak kepada ekonomi kerakyatan, misal kebijakan impor beras yang lebih berpihak kepada makelar importir beras dan sama sekali tidak berpihak kepada petani.

Kebiasaan mengimpor barang hasil produksi bangsa lain, berarti hilangnya kemandirian bangsa. Sikap ini bisa digolongkan dengan **a-nasionalis**. Seharusnya segala kebutuhan kita dipenuhi oleh hasil jerih payah bangsa sendiri. Ingat sewaktu Wakil Presiden menyatakan bahwa pemerintah hanya mengijinkan mengimpor beras

0,25 per mil menunjukkan lemahnya semangat kemandirian pimpinan bangsa. Sepatutnya Wakil Presiden dengan gigih mengajak kerja keras demi tercapainya swa sembada beras, bahkan terus meningkatkan produktivitas, hingga Indonesia menjadi peng-ekspor beras yang besar.

Tidak hanya bencana lingkungan dan bencana ekonomi saja yang saat ini mengancam Jawa Barat. **Bencana sosial**-pun telah terjadi, antara lain yaitu: **lunturnya kearifan budaya lokal, krisis moral, politik tidak memihak rakyat, budaya tidak disiplin, kolusi-korupsi-nepotisme, dan terorisme**. Semuanya tersebut telah membuat ekonomi kerakyatan terpuruk dan peningkatan kesejahteraan rakyat mandeg.
Moral rendah pada umumnya melanda para pemimpin, bercirikan sikap mengesampingkan kepentingan rakyat, mendewa-dewakan kedudukan, kekuasaan, kemewahan materi dan sikap egoisme yang tinggi.

Kita tidak cukup hanya bicara sana-sini, seminar sana-sini, diskusi sana-sini. Kita tidak bisa hanya mengeluh, kita tidak bisa hanya berpangku tangan menunggu program birokrat yang tidak merakyat, atau menunggu belas kasihan dari bangsa lain. Rakyat keburu semakin sengsara, *kaburu langlayeuseun*, bila tidak ada gerakan yang "prak" langsung di lapangan dan bisa dinikmati masyarakat yang membutuhkan. Bukan model "mie instant", tetapi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan dikerjakan bersama rakyat. Kita harus mampu mengisi kekosongan dan kelemahan program-program

birokrat dengan inisiatif masyarakat yang kreatif dan mandiri secara semesta.

Lalu apa yang harus kita lakukan menyikapi hal ini? Jawabnya adalah: *back to basic*, yang maknanya *balik ka pamiangan manjangkeun silaturahim pikeun ngawangun kasejahteraan rakyat*, yaitu membangun kembali inisiatif ekonomi kerakyatan secara serius.

Kita maklumi bahwa sebagian besar penduduk bangsa ini tinggal di pedesaan. Kita yakini bahwa bila desa kuat, maka negara akan kuat. Namun saat ini fakta yang kita lihat adalah pembangunan yang tidak seimbang. Pedesaan dilupakan, sumber daya alam pedesaan dikuras untuk membangun perkotaan berskala Metropolitan, Kosmopolitan atau Megapolitan. Lingkungan pedesaan menjadi rusak dan akhirnya beramai-ramai penduduk pedesaan terpaksa ber-urbanisasi ke perkotaan, karena pedesaan tidak lagi menjanjikan masa depan. Seharusnya ada keseimbangan pembangunan, bukan sekedar membangun metropolitan atau kosmopolitan saja, tetapi juga membangun Agropolitan dengan dukungan ekonomi pedesaan yang handal, sehingga tidak terjadi urbanisasi tanpa arah.

Kita harus melaksanakan swadaya dan swadesi, yaitu gerakan kreatif dan mandiri mampu berdiri di atas kaki sendiri. Membangun desa yang pada umumnya keadaannya sekarang sangat memprihatinkan, menjadi desa swasembada dan mandiri, terpaksa harus dilaksanakan terlebih dahulu dengan tahapan penyelamatan, untuk seterusnya masuk tahapan

peningkatan, baru sampai ke tahapan desa swasembada mandiri!

Sejak bermula, kelompok DPKLTS telah bertekad mengangkat derajat rakyat dari segala penderitaan. Di awal tahun 2005, pada saat masyarakat di Nanggroe Aceh Darussalam mengalami musibah bencana alam gempa dan tsunami, DPKLTS bersama masyarakat Jawa Barat telah membentuk lembaga krisis dengan nama Jabar Peduli Aceh (JPA). Selanjutnya JPA ini berhasil menghimpun material bantuan dari para donatur dan menyalurkan langsung ke Nanggroe Aceh Darussalam berupa 16 truk bahan pokok, sepatu dan pakaian baru, 2 unit sumur bor air dan 1 unit mobil ambulans.

Di masa yang akan datang, ancaman bencana lingkungan, bencana ekonomi dan bencana sosial akan semakin besar, dan kita harus semakin mewaspadi bahwa kehidupan ini tidak akan semakin mudah, apabila mulai hari ini kita tidak bertindak. Oleh sebab itu, dalam rangka menggali dan menumbuhkan *sense of crisis* di antara kita dan segera tecapainya cita-cita kesejahteraan rakyat Jawa Barat, maka saya mencanangkan pula secara resmi Gerakan Bersama yang diberi nama: Jabar Peduli Bencana (JPB), yang intinya adalah membantu masyarakat Jawa Barat untuk dapat menolong dirinya sendiri.

Pada awalnya**,** material sumbangan antara lain berupa beras dan pakaian bekas layak pakai yang diperoleh dari kelebihan material yang tadinya akan disampaikan kepada masyarakat korban bencana gempa dan tsunami

Aceh melalui Jabar Peduli Aceh (JPA). Atas seijin donatur, material ini kemudian disalurkan kepada masyarakat Jawa Barat yang sangat membutuhkan melalui embrio Jabar Peduli Bencana (JPB). Sejauh ini JPB telah menyampaikan material sumbangan tersebut kepada 18 desa di Jabar yang sangat membutuhkan dengan total kurang lebih 15 ton beras dan 70 doos besar berisi pakaian bekas layak pakai.

Saya menekankan bahwa gerakan JPB ini harus berkesinambungan, sebab penderitaan rakyat Jawa Barat tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat akibat degradasi lingkungan yang telah sedemikian parah. Bencana iklim masih saja menjadi langganan rutin setiap tahun, musim penghujan dilanda banjir dan longsor, musim kemarau dilanda kekeringan dan temperatur ekstrim.

Kita perlu belajar dari peristiwa bencana gempa dan tsunami di Aceh, seluruh perhatian tertumpah ke Nanggroe Aceh Darussalam. Tidak ketinggalan masyarakat Jawa Barat juga memberikan bantuan dan perhatian khusus kepada para korban di Aceh ini. Namun sangat disayangkan, justru di provinsi sendiri, masyarakat Jawa Barat kurang perhatian terhadap peristiwa-peristiwa kebencanaan yang juga menelan korban tidak sedikit. Kita tidak mengharapkan bencana dengan skala sebesar di Aceh akan terjadi di Jawa Barat, namun kita harus waspada dan cepat tanggap apabila bencana sewaktu-waktu terjadi. Oleh sebab itu keberadaan Jabar Peduli Bencana (JPB) merupakan hal yang layak dan perlu sebagai *Crisis Centre* inisiatif

masyarakat Jawa Barat, dengan semangat: *sasieureun sabeunyeureun, sarerea milu ulubiung.*

Gerakan JPB ini harus berbasis keikhlasan, kearifan, kemandirian, keberdayaan, dan kesemestaan, untuk membantu masyarakat agar mampu menolong dirinya sendiri, secara tabah dan kreatif membangun kelompoknya, desanya, wilayahnya, bangsanya. Mampu dan berani bersikap kritis korektif terhadap penyelewengan-penyelewengan khususnya yang dilakukan oleh birokrasi yang berdampak terhadap merosotnya lingkungan hidup.

Kepada seluruh warga yang mampu, JPB menyerukan: *"Hayu urang kumpulkeun saloba-lobana bantuan jang rahayat anu menderita, utamana beas jeung baju layak pakai!"*

Paket pedesaan tidak sekedar berteori

Luas wilayah Jawa Barat 34.669,11 km2, terdiri dari 16 Kabupaten, 9 Kota, 565 Kecamatan dan 5.813 Desa dan Kelurahan, diantaranya hampir 1.000 desa berada di pinggir hutan. Total penduduk Jawa Barat 38.472.185 jiwa, rata-rata laju pertumbuhan penduduk kurun waktu 1990-2000 mencapai 2,17%, dengan kepadatan rata-rata mencapai 1.022 jiwa/km2

Penduduk miskin, dari tahun ke tahun tidak berkurang, tahun 1999: 8.393.400 jiwa (24,29%); tahun 2000: 9.425.000 jiwa (26,82%); tahun 2001: 9.162.000 jiwa

(25,40%); tahun 2002: 9.133.747 jiwa (24,74%); tahun 2003: 9.279.668 jiwa (24,43%); tahun 2004: 10.753.672 jiwa (27,51%).

Perkembangan kualitas sumber daya manusia Jawa Barat yang diindikasikan dengan IPM (Indek Pembangunan Manusia) dari tahun ke tahun hanya berjalan di tempat alias "mandeg" sebagai berikut: tahun 1999 (64,60); tahun 2000 (65,20); tahun 2001 (66,10); tahun 2002 (67,45); tahun 2003 (67,87); tahun 2004 (68,36). IPM ini berdasarkan indek pendidikan, kesehatan dan daya beli, padahal cita-cita pada tahun 2010 Jawa Barat memiliki IPM 80. Setelah kenaikan BBM, malah disebut-sebut 50% warga Jawa Barat menjadi miskin.

Sebagai gambaran secara nasional, menurut Forum Ekonomi Dunia, sebelum krisis tahun 1998, daya saing Indonesia di urutan 31 dunia. Tahun 1999-2003 kedudukannya jatuh ke urutan 37, 44, 49, 69 dan mendarat di urutan 72. Angka kewirausahaan kita hanya sebesar 16 sampai 18 orang per 1.000 penduduk, atau hanya sekitar 1,5% dari jumlah penduduk usia produktif. Ternyata wirausaha belum menjadi impian kita, dan di masa depan anak-anak kita tetap akan antre berebut ijazah mengejar gelar dan jabatan, bukan bekerja dalam arti yang sebenarnya.

Mengapa bisa terjadi? Kebijakan pengentasan kemiskinan yang ada hanya ada ditataran program dan teori. Pembangunan sumber daya manusia masih merupakan wacana saja. Rakyat semakin jauh dari sejahtera, semakin jauh dari sumber dana untuk dapat

berusaha, dan prosesnyapun tidak mudah, bahkan persyaratannyapun diluar kemampuan rakyat. Rakyat terjebak kepada pemodal dengan bunga tinggi yang mencekik leher, terjebak *"ijon"* dan *"yarnen"* (dibayar setelah panen) yang akhirnya rakyat semakin miskin.

Besarnya angka kemiskinan di Jawa Barat ini tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak berbasis lingkungan, tidak pro rakyat dan sosial budaya setempat. Lebih banyak mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis ekonomi jangka pendek dan hanya menguntungkan pemodal, sehingga timbul bencana lingkungan, bencana sosial dan akhirnya bencana ekonomi. Dapat dicontohkan luas kawasan lindung Jawa Barat yang seharusnya seluas 45%, kenyataan saat ini tinggal tidak lebih dari separuhnya. "Illegal logging" yang masih marak, penambangan batu dan pasir di kawasan lindung, lunturnya kearifan budaya lokal, krisis moral, politik tidak memihak rakyat, budaya tidak disiplin, kolusi-korupsi-nepotisme.

Sumber daya alam pedesaan dikuras untuk membangun metropolitan dan kosmopolitan dengan "super market" dan "hiper market"-nya. Lingkungan pedesaan menjadi rusak, ekonomi pedesaan hancur, pasar tradisional hilang, dan akhirnya beramai-ramai penduduk pedesaan terpaksa ber-urbanisasi ke perkotaan, karena pedesaan tidak lagi menjanjikan masa depan. Akhirnya rakyat jelata menjadi miskin lahan, miskin modal, miskin ketrampilan dan miskin berwirausaha.

Kemiskinan semakin meningkat oleh sebab: kenaikan harga BBM yang mengakibatnya turunnya daya beli masyarakat akibat harga berbagai kebutuhan yang melonjak tajam. Kemiskinan akan semakin melonjak lagi bila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di kalangan industri akibat imbas beban biaya produksi yang tinggi.

Apa upaya kita? Kita tidak cukup hanya sekedar bicara, seminar dan diskusi. Kita tidak bisa hanya mengeluh, kita tidak bisa hanya berpangku tangan menunggu program birokrat yang tidak merakyat, atau menunggu belas kasihan dari bangsa lain. Kita yakini bila ekonomi kerakyatan handal, ekonomi pedesaan maju, maka ekonomi nasionalpun akan kuat.

Lalu apa yang harus kita lakukan menyikapi hal ini? Jawabnya adalah: *back to basic, balik ka pamiangan, mulih ka purwadaksina,* yang maknanya yaitu membangun kembali inisiatif ekonomi kerakyatan secara serius.

Kita harus melaksanakan swadaya dan swadesi, yaitu gerakan kreatif dan mandiri mampu berdiri di atas kaki sendiri. Membangun desa yang pada umumnya keadaannya sangat memprihatinkan menjadi desa swasembada dan mandiri, terpaksa harus dilaksanakan terlebih dahulu dengan tahapan penyelamatan, untuk seterusnya masuk tahapan peningkatan, baru sampai ke tahapan desa swasembada mandiri!

Di masa yang akan datang, ancaman bencana lingkungan, bencana ekonomi dan bencana sosial akan semakin besar, dan kita harus semakin mewaspadi bahwa kehidupan ini tidak akan semakin mudah, apabila mulai hari ini kita tidak bertindak.

Sudah saatnya muncul Gerakan Bersama yang mampu membina rakyat secara utuh terpadu: bina manusia, bina lingkungan dan bina usaha. Keberadaan lembaga keuangan mikro harus pro rakyat dengan bina wirausaha yang mudah diserap rakyat.

Saya sangat menghargai langkah nyata *"prak-prung-der"* dari Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS) bersama organisasi BARASETRA yang merupakan organisasi inspiratif dari DPKLTS yang mempunyai jangkauan nasional seluruh Indonesia untuk segera membangun sentra-sentra pelatihan kader agar keberdayaan dan kemandirian rakyat terutama di perdesaan dapat dioperasikan. Bukan saja untuk peserta asal Jawa Barat, tetapi juga untuk peserta dari seluruh Indonesia, dengan jenis pelatihan antara lain:

- Paket program kemandirian energi perdesaan, yaitu dengan diverfisikasi bahan bakar minyak fosil dengan bio-oil jarak pagar (*Jatropha Curcas*)
- Paket program swasembada beras dengan menanam padi secara seksama menggunakan konsep padi "SRI" (*System Rice Intensification*) yang ditunjang dengan kompos dan dapat menghasilkan padi kurang lebih 14 ton/ hektar/ panen.

- Paket program pembuatan kompos dengan bantuan *"starter"* mikro organisme lokal (MOL) buatan petani sendiri.
- Paket program pembibitan tanaman keras yang diharapkan menjadi bank bibit atau bank pohon Jawa Barat
- Paket program kredit tanpa agunan, bekerja sama dengan Bank Jabar, untuk pertanian, perikanan dan perdagangan umum dalam rangka perkuatan ekonomi rakyat. Walaupun paket kredit banyak menemui kendala dan tidak selancar seperti yang diduga, namun harus tetap diupayakan realisasinya.

Kita harus mampu membentuk "think tank" dengan anggota para pakar termasuk dari perguruan tinggi yang tidak hanya berteori saja, tetapi mampu menciptakan Pusat Penanggulangan Krisis *(Crisis Centre)* sebagai inisiatif warga Jawa Barat, menciptakan paket-paket program pembangunan ekonomi kerakyatan, yang *"workable"* dan *"bankable"*.

Pada kesempatan yang baik ini, saya mengingatkan kepada seluruh jajaran civitas akademica perguruan tinggi, agar Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian, benar-benar untuk kembali dilaksanakan seutuhnya, terutama dalam hal pengabdian kepada masyarakat. *"Let us start with small success, and finish with big success"*.

Menanam padi secara seksama

Sawah sebagai bioreaktor

Padi bukan tanaman air, tetapi memerlukan air. Apabila cara menanam padi masih seperti sekarang ini, yaitu direndam air, tanahnya dipupuk dengan pupuk kimia maka sebenarnya rakyat sedang diajari dan dipaksa "meracuni" tanah, tanaman, dan badannya sendiri.

Saya sangat mendorong agar petani sawah merubah paradigma cara menanam padi dengan konsep "SRI" *("System of Rice Intensification"),* yaitu:

- Mengubah pendekatan intensifikasi lama yang meningkatkan *input* eksternal melalui penambahan pupuk, pestisida, dan herbisida kimiawi, dengan pendekatan intensifikasi proses yang memfungsikan kembali proses mikrobiologis alami di ruang akar dan pori tanah menjadi pabrik mikro yang akan memasok beragam hara bagi tanaman secara berkesesuaian dan berkesinambungan.
- Menanam padi secara seksama untuk menyehatkan dan memaksimumkan kembali sistem perakaran tanaman, dan penggunaan kompos untuk menyehatkan kembali tanah dan memperkaya keanekaragaman biota tanah yang akan memperbaiki kuantitas dan kualitas produksi hara bagi tanaman. Benih padi ditanam satu per satu pada umur 5-8 hari setelah penyemaian, dengan jarak tanam antara 30-50 cm.
- Penggunaan kompos memberikan perbaikan struktur tanah sekaligus juga siklus nutrisi di dalam tanah,

sementara pengguna pupuk kimia menyebabkan tanah menjadi padat, lengket dan teracuni, menurunkan populasi mikroorganisme dalam tanah. Penanaman padi cara SRI secara swadaya di Jawa Barat telah mencapai lebih 500 hektar dan mampu meningkatkan produktivitas nyata dari 4,5 ton/hektar/panen gabah kering pungut menjadi 9 sampai 12 ton/ha/panen gabah kering pungut. Produk SRI petani di Garut secara berturut-turut memberikan hasil yang makin lama makin bertambah baik yaitu dari 9,4 ton/ha/panen, 11 ton/ha/panen, 14 ton/ha/panen, bahkan ada yang mencapai 17,5 ton/ha/panen dengan mutu padi yang lebih baik (mutu padi organik).

- Dengan perubahan yang dilakukan, semua input eksternal seperti pupuk, insektisida, dan herbisida kimiawi bahkan dihilangkan, justru memberikan hasil yang lebih produktif (tanaman lebih tinggi, anakan lebih banyak, malai lebih banyak, bulir lebih berat), lebih sehat (tanaman lebih tahan hama dan penyakit), lebih kuat (tanaman lebih tegar, tahan kering dan tekanan abiotik), lebih menguntungkan (biaya produksi rendah), dan memberikan risiko ekonomi yang lebih rendah.
- Intensifikasi proses seperti ini dapat diterapkan tidak saja untuk padi di sawah, namun juga untuk tanaman sayuran di kebun dan pohon tahunan di perkebunan, dengan ciri khas mampu menaikkan produktivitas hingga 2-10 kali lipat. Uji coba pada stroberi memberikan hasil lebih berat dan lebih tahan lama.
- Kita harus segera menciptakan kader-kader penyuluh padi SRI sebanyak mungkin. Sosialisasikan bahwa kompos dan mikroorganisme lokal dapat dibuat

sendiri oleh rakyat petani dan hasil tanaman pun akan jauh lebih bermutu dan mampu bersaing dengan produk pertanian luar negeri. Konsep pembuatan kompos untuk menyuburkan kembali tanah pertanian telah tersirat dalam *uga Siliwangi*, yaitu *ngangon kalakay jeung ngitung tunggul.*

Keuntungan berlipat ganda

Peningkatan produktivitas pertanian padi dengan cara seksama (SRI) akan sangat menguntungkan petani produsen maupun petani konsumen, dengan perhitungan seperti di bawah ini:

- **Luas sawah** Jawa Barat 700.000 ha (dibulatkan dari RTRW JABAR 2003)
- **Produktivitas:**
  Cara Konvensional
  = 700.000 ha x 4,5 ton/ ha/ musim x 2 musim/ thn
  = 6.300.000 ton/ thn.
  Cara Seksama (SRI)
  = 700.000 ha x 9 ton/ ha/ musim x 2 musim/ thn
  =12.600.000 ton/thn
  (terdapat kenaikan produksi +100%).
- **Konsumsi:**
  Beras
  = 40.000.000 orang x 0,5 kg beras/hari x 365 hari/thn
  = 7.300.000 ton beras/thn,
  setara dengan gabah
  = 7.300.000 ton/ thn x 1/0,6
  = 12.200.000 ton/thn.

(Jumlah konsumsi dapat dipenuhi oleh jumlah produksi 12.600.000 ton/thn).

- **Harga Pasar:**
  Harga saat ini yang dianggap tak terbeli petani konsumen Rp 5000,-/kg beras.
  Harga yang dianggap layak terbeli oleh petani konsumen Rp 3000,-/kg beras.
- **Pendapatan:**
  Cara Konvensional
  = 6.300.000 ton/ thn x 0,6 x Rp 5000,-/ kg
  = Rp 18.900.000.000.000,-.
  Cara Seksama (SRI)
  = 12.600.000 ton/thn x 0,6 x Rp 3000,-/kg
  = Rp 22.680.000.000.000,-.
  Terdapat kenaikan pendapatan
  = Rp 22,68 trilyun – Rp 18,9 trilyun
  = Rp 3,78 trilyun, atau setara dengan kenaikan 20%

Perhitungan di atas mestinya meyakinkan kita bahwa untuk Jawa Barat menanam padi cara seksama (SRI) adalah suatu keharusan dan bukan sekedar untuk pilihan.

Dengan terobosan menanam padi secara seksama, saya memastikan di masa yang tidak akan lama kita akan mampu swasembada pangan, bahkan kembali kepada kekuatan dasar pertanian yang sangat produktif untuk berbagai produknya.

Mengolah sampah menjadi rupiah

Musibah sampah

Semenjak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah longsor dan menimbulkan banyak korban pada tanggal 21 Februari 2005 yang lalu, praktis Kota Bandung dan Kota Cimahi tidak memiliki TPA yang dapat diandalkan. TPA yang tadinya telah ditinggalkan terpaksa dimanfaatkan lagi, antara lain TPA Jelekong, Pasirimpun dan Cicabe. Namun karena keterbatasan kapasitas lokasi-lokasi ini dan warga sekitar bereaksi menolak, maka telah 3 kali Kota Bandung mengalami musibah darurat sampah. TPS-TPS penuh, sampah tidak terangkut, Kota Bandung tenggelam dalam sampah, menebar bau dan penyakit. TPA yang baru-pun sulit diketemukan.

Dalam 1 (satu) hari Kota Bandung memproduksi sampah kurang lebih sebanyak 5.000 m3 hingga 7.500 m3 atau dalam 10 hari jumlah produksi sampah setara dengan besarnya Gedung Sate. Sumber sampah Kota Bandung berasal dari rumah tangga sebanyak 60%, sisanya berasal dari pasar, kawasan industri, kawasan komersial dan non komersial. Komposisinya terdiri dari 65% sampah basah dan 35% sampah kering. Sampah organik dan anorganik campur aduk menjadi satu, kotor dan tidak etis.

Warga menolak TPA

Saat TPA yang baru belum juga ditemukan, sampah dari sumbernya juga tidak dihentikan, warga masih terus membuang sampah sembarangan, maka akibatnya TPS-TPS pun penuh dan sampahpun menggunung di sudut-sudut kota. Walikota Bandung dan Walikota Cimahi bingung mencari TPA. Banyak lahan di Kabupaten Bandung, namun Bupati Bandung pun tidak dapat berbuat banyak ketika warga setempat menolak bila daerahnya akan dijadikan TPA. Gubernur Jawa Barat memberikan kesempatan kepada Walikota dan Bupati untuk berkoordinasi secepatnya menyelesaikan sampah kota Bandung dan Cimahi yang berceceran. Tak kurang dari Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Dalam Negeri, Bahkan Wakil Presiden ikut berkomentar atas musibah sampah ini. Ternyata prosedur dan mekanisme menentukan TPA tidak semudah yang kita bayangkan!

Mengingat sampah rumah tangga mencapai 60% dari total sampah kota, prioritaskan agar warga merubah perilaku, dari membuang sampah menjadi mampu mengelola sampah, misalnya dengan membuat kompos rumah tangga. Konsep *"zero waste"* di rumah tinggal harus menjadi paradigma baru. Konsep *"zero waste"* ini saya sebut sebagai pengelolaan sampah *Tuntas I*. Nilai tambah konsep *Tuntas I* yaitu digalakkan agar setiap rumah tangga atau kelompok RT dan RW mampu memanfaatkan komposnya untuk pertanian rumah tangga atau pertanian kota (*city farm*). *City farm* ini bisa dikembangkan lebih lanjut sebagai unsur eko-wisata

perkotaan. Perubahan paradigma menuju warga kota yang berperilaku hidup bersih perlu disosialisasikan menuju cita-cita Bandung Bermartabat.

Sedangkan sampah basah yang belum dapat diproses dari sumbernya, antara lain sampah pasar, seyogyanya dibuatkan terobosan untuk diproses menjadi kompos di Tempat Pengolahan Kompos (TPK) di kawasan pertanian, perkebunan dan kawasan hutan. Dengan syarat sampah sudah dipilah lebih dulu dan transpot menjadi tanggung jawab PD Kebersihan. Konsep TPK ini saya sebut sebagai *Tuntas II*.

TPA sebagai Tempat Pengolahan Akhir, bukan Tempat Pembuangan Akhir, tetap diperlukan yaitu untuk memusnahkan sampah kering yang tidak dapat di daur ulang. Bila memungkinkan bisa saja diproses menjadi sesuatu yang berguna, misalnya menjadi energi listrik. Konsep TPA ini saya sebut *Tuntas III*. Sisa sampah organik yang tidak terproses di Tuntas I dan Tuntas II, dapat diproses menjadi kompos bermutu di *Tuntas III*.

Setelah kondisi mantap, diharapkan di rumah tinggal dapat mengolah menjadi kompos 25% dari total produksi sampah per hari, di TPK dapat mengolah menjadi kompos 25% dari total produksi sampah per hari, dan di TPA mampu memproses sampah kering untuk energi dan sampah basah untuk kompos 50% dari total produksi sampah per hari dari total sampah kota.

Domain persampahan adalah pelayanan, tetapi dengan sistem “tuntas” berazas manfaat ini, semua dapat

menikmati keuntungan ekonomi. Sampah bila diolah dengan seksama bisa menjadi rupiah. Paradigma pengolahan sampah harus diubah, dari *kumpul-angkut-buan*g menjadi *pilah-olah-berkah.* Perlu *“political will”* pemerintah untuk sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan monitoring.

4

MEMBERANTAS BUDAYA KONSUMTIF DAN KKN

Investasi terus "anjlog"

Sebelum tahun 1997, Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi didorong oleh peningkatan investasi dan perluasan sektor industri, walaupun kita menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut berlangsung di atas fundamental ekonomi yang rapuh. Terbukti sejak terjadinya krisis tahun 1997-1998 ekonomi Indonesia merosot tajam dan masih terus menurun. Hal ini diperparah oleh krisis keuangan ditambah krisis-krisis lain yang telah memperlemah sistim keuangan dan kepemerintahan (governance) yang menyebabkan penurunan investasi dan perlambatan perkembangan sektor swasta. Investasi menurun drastis,

menurunkan kegiatan perekonomian secara umum. Sebagai gambaran, tingkat investasi sekarang hanya sekitar 16% dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh dari kondisi sebelum krisis yang sudah mencapai lebih dari 30%. Pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 4-5 % dalam tiga tahun terakhir, itupun sebagian besar didorong oleh kenaikan permintaan barang konsumtif dan tidak menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga tingkat pengangguran terus meningkat dan tingkat kemiskinan terus bertambah. Globalisasi yang ditandai oleh persaingan yang sangat ketat antar negara dan antar perusahaan mengakibatkan semakin parahnya perkembangan ekonomi kita. Perkembangan investasi terus ’anjlog’ turun dari tahun ke tahun hingga saat ini.

Akumulasi pola konsumtif

Kebijakan investasi yang dilakukan selama ini menjadi suatu masalah yang sangat serius bagi perkembangan ekonomi bangsa kita, terutama dalam pembentukan perilaku masyarakat yang semakin cenderung untuk bertidak dan berperilaku semakin konsumtif. Hal ini dapat diperlihatkan dari gambaran 10 perusahaan besar terbaik di Indonesia yang termasuk dalam ’Top 200 best companies in Asia’ menurut ’Far Eastern Economic Review’ (2004), yang ternyata lebih didorong oleh produk barang-barang konsumtif belaka. Urutan skor-nya adalah: Astra (6,06), Indofood (5,90), Sampurna (5,72), Gudang Garam (5,55), Indosat (5,42), Jarum (5,10), Telkomsel (5,03), Satelindo (4,97), Sosro (4,95), SCTV (4,94). Apabila kita memperhatikan data tersebut

diatas maka jelas menggambarkan perilaku masyarakat kita dari tahun ketahun semakin konsumtif, sehingga mucul ungkapan: *”Orang semakin gandrung membeli mobil dan motor sebanyak-banyaknya, lalu senang makan mie instan dan roti, merokok untuk menghilangkan stress, kemudian kesana-kemari menenteng handphone, apabila di rumah menonton TV acara telenovela dan dunia kenampakan , sambil asyik minum teh Sosro.”*

Pola konsuntif dari masyarakat tersebut tidak pernah disadari oleh kita semua, yang diperparah lagi oleh kepemilikan dari perusahaan tersebut yang sahamnya sudah dimiliki oleh orang asing, sehingga dengan demikian masyarakat kita senang membuang-buang uang dan memakmurkan pengusaha/ bangsa asing.

Ternyata betapa lemahnya industri kita, tidak ada industri strategis kita yang berkembang dengan baik dan berpeluang menjadi perusahaan besar yang mampu berskala internasional. Belum lagi pola konsumtif sebagian masyarakat kita yang gemar berbelanja dan menggunakan produk-produk luar negeri,mulai barang yang ”ber merk” sampai dengan barang luar negeri ”tidak bermerk dan murahan” misalkan produk Cina, India, dan sejenisnya. Kondisi ini tentunya memperparah terhadap permintaan produk dalam negeri dan malahan meningkatkan permintaan terhadap barang luar negeri sementara investasi kita stagnan bahkan menurun, begitu juga persentase rata-rata impor kita jauh lebih besar dari rata-rata ekspor dan rata-rata investasi.

Otonomi daerah dan korupsi

Tuntutan utama dari Reformasi adalah Demokrasi dan Otonomi Daerah, dengan keyakinan bahwa dengan dijalankannya kedua aspek tersebut maka percepatan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi akan terealisir dengan cepat. Namun sayang impian tersebut tidak menjadi kenyataan, padahal masyarakat sangat berharap sekali, supaya realisasi pencapaian kesejahteraan dapat dinikmati segera. Demokratisasi berjalan namun yang paling menikmati hanyalah kalangan politisi dan segelintir pihak yang berkaitan dengan hal tersebut, begitu juga otonomi daerah hanya lebih dinikmati oleh para birokrat,para politisi, dan pihak-pihak yang bersinggungan dan berkaitan dengan kedua kelompok tersebut. Sedangkan masyarakat dan dunia usaha serta para investor merasakan buah pahit dari otonomi tersebut. Sebagai gambaran mari kita analisis beberapa fakta berikut ini.

Urutan terburuk bidang korupsi

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang disusun oleh Transparansi Internasional, Indonesia menduduki urutan 122 dari total 133 negara, sehingga jauh lebih buruk dibandingkan negara ASEAN lainnya. Korupsi semakin memburuk sejak pelaksanaan desentralisasi/ otonomi daerah. Sebelumnya, pengusaha mengetahui berapa

besar dan kepada siapa jumlah tertentu harus dibayarkan agar urusan lancar. Sekarang semuanya serba tidak jelas, sementara urusan juga belum tentu terjamin akan lancar. Ketidak-jelasan ini tentunya berakibat buruk bagi dunia usaha. Hal ini diperparah lagi oleh maraknya pungli-pungli di daerah atau di pusat-pusat kegiatan bisnis, baik yang dilakukan oleh preman-preman atau lembaga/ organisasi yang mengatas namakan masyarakat, kesatuan dan orpol, dan lain-lainnya. Permasalahan yang memberatkan manakala berhadapan dengan mereka adalah adanya intimidasi, kekerasan bahkan tindakan fisik dan perusakan. Hasil studi menunjukkan bahwa 38% dari perusahaan yang ada menganggap masalah korupsi sudah sangat serius, melebihi keadaan di RRC dan Filipina.

Biaya melaksanakan usaha di Indonesia menduduki urutan 46, lebih buruk dibandingkan Malaysia, Thailand dan RRC. Pengumpulan pajak di Indonesia juga tidak efisien karena korupsi. Nampak bahwa korupsi itu dilaksanakan oleh pihak birokrat dari tingkatan tertinggi sampai tingkat terbawah yang berimbas dan merasuk ke berbagai pihak di luar birokrasi. Dengan demikian korupsi ini sudah menjadi suatu kolektivitas atau kebersamaan, sehingga di Indonesia dikenal korupsi berjamaah.

Betapa mengagetkan, dalam sektor ekonomi ternyata Bupati/ Walikota menempati tempat tertinggi padahal seharusnya yang bersangkutan menjadi suri tauladan bagi terciptanya pemerintahan yang bersih. Semula korupsi terbesar berkembang di pusat pemerintahan dan

di pulau Jawa, namun sekarang sebaliknya korupsi terbesar/ terbanyak berada di luar pulau Jawa.

Sedangkan di luar pemerintahan, masih dalam sektor ekonomi, ternyata posisi pertama dan kedua ditempati oleh LSM dan wartawan. Padahal inti dari otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat dalam keterlibatannya pada fungsi pengawasan terhadap terselenggaranya otonomi daerah, namun dalam hal ini justru menjadi pelaku korupsi di daerah.

Peraturan berlebihan mendorong korupsi

Esensi utama dari otonomi daerah adalah kemudahan, kecepatan dan efisiensi. Namun demikian kenyataan yang terjadi adalah sejalan dengan bertambahnya provinsi dan kota/ kabupaten di Indonesia, maka jumlah peraturan di daerah pasca otonomi daerah semakin bertambah. Semangat untuk membuat peraturan daerah (perda) sangat tinggi, hal ini diperparah bahwa sebagian besar perda-perda tersebut membawa konsekuensi pada waktu perijinan dan bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan.

Dari peraturan yang dikeluarkan ternyata keefektifan peraturan pemerintah juga sangat rendah, lebih rendah dari negara negara tetangga. Pemerintahan yang baik membutuhkan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, kejelasan peraturan dan transparansi dalam pelaksanaan. Hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah sekarang

terutama kalau target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ingin tercapai.

Pendirian dan penutupan usaha di Indonesia termasuk yang paling lama dan mahal. Untuk mendirikan sebuah perusahaan di Indonesia, dibutuhkan waktu kurang lebih 151 hari sementara di negara ASEAN lainnya masing-masing kurang dari 60 hari. Urutan beban administrasi untuk mendirikan perusahaan di Indonesia mencapai 64 dari 102 negara, jauh lebih buruk dibandingkan Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Sementara Indonesia juga termasuk salah satu yang terburuk (menempati urutan 97) diantara negara yang tercakup dalam *Global Competitiveness Report* dalam bidang hambatan birokrasi yang dicerminkan dengan banyaknya waktu yang diperlukan untuk berurusan dengan aparat pemerintah.

Bila korupsi diberantas, tingkat pertumbuhan PDB Indonesia bisa bertambah 2-3% atau tambahan pendapatan per kapita sekitar $ 100 serta tambah lapangan kerja bagi 4,5-5 juta orang yang bisa diserap oleh aktivitas produktif, yang berarti memotong setengah dari tingkat pengangguran saat ini.

Daya saing yang "keteteran"

Selama dua tahun terakhir ini, pemerintah telah memperkuat kestabilan makroekonomi Indonesia dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi inflasi, menstabilkan rupiah, mengurangi rasio utang luar

negeri dan utang publik. Kondisi makro ekonomi memang sempat sangat menggembirakan dan merupakan babak baru karena inflasi turun, devisa naik, rupiah menyentuh angka delapan ribu, IHSG menguat tajam. Meskipun adanya pencapaian yang mengesankan ini, pertumbuhan ekonomi tetap berada di tingkat sedang dan masih digerakkan oleh konsumsi. Lapangan kerja sektor formal menurun dan pengangguran secara keseluruhan beranjak naik. Ini memperlihatkan bahwa pertumbuhan pada tingkat sedang di Indonesia saat ini tidak memadai untuk menciptakan cukup kesempatan kerja bagi jutaan kaum muda yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Penyebab utamanya adalah investasi dalam dan luar negeri yang sangat lemah; pangsa investasi dalam PDB berada pada tingkat terendah sejak awal 1970-an. Pada saat yang sama, para pesaing regional Indonesia terus membuat upaya yang terus-menerus untuk memperbaiki iklim investasi mereka. Hal ini telah memungkinkan beberapa negara (misalnya Cina dan Vietnam) menarik sejumlah besar investasi besar, dan dalam banyak kasus, menarik investasi yang ada dan potensial dari Indonesia. Daya saing Indonesia sangat ketinggalan atau *"keteteran"* dibanding para pesaingnya dari segi persentase PDB untuk total investasi. Berbagai faktor mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, antara lain KKN, kurangnya transparansi dan ketidakefisienan yang telah menciptakan rintangan yang sangat berarti dan menimbulkan peningkatan biaya moneter dan waktu bagi para investor di tingkat pusat dan daerah. Dalam beberapa kasus, biaya-biaya ini telah memaksa perusahaan untuk pindah ke negara lain atau memilih

negara lain ketimbang Indonesia sewaktu membuat keputusan berinvestasi di kemudian hari.

Sistem hukum telah gagal melindungi kemurnian kontrak, dan dunia telah menyaksikan penyalahgunaan sistem hukum yang telah membuat iklim investasi Indonesia merosot. Meskipun desentralisasi telah menciptakan kesempatan, tapi juga telah menimbulkan ketidakpastian peraturan dan biaya tambahan pada tingkat daerah. Laporan Pembangunan Dunia 2005 (*World Development Report* 2005) oleh Bank Dunia menyoroti dampak serius permasalahan yang dihadapi para investor ini di Indonesia lebih dari 40 persen perusahaan yang disurvei menganggap korupsi sebagai kendala utama di Indonesia, dengan biaya suap mencapai 4,6 persen dari penjualan. Hampir separuh dari perusahaan yang disurvei menyebutkan ketidakpastian kebijakan dan besarnya biaya siluman sebagai kendala utama.

Sebagai gambaran dapat kita tarik kesimpulan bahwa persoalan yang mendasar adalah pungli dan perijinan yang menempati persentase terbesar, sedangkan aspek infrastruktur merupakan masalah yang terkecil. Selama ini justru kita sering menganggap bahwa infrastruktur menjadi masalah utama, sampai-sampai kita mengadakan *Indonesian Insfrastructure Summit, Jabar Insfrastructure Summit,* dan lain-lainnya. Namun kenyataannya investor masing enggan berinvestasi, mengingat inti permasalahannya terletak pada aspek hambatan lain-lainnya.

Ketenaga-kerjaan yang tidak profesional

Era globalisasi saat ini membawa konsekuensi terhadap persaingan yang ketat (*hyper competition*), yang tidak hanya berlangsung secara makro antar pelaku ekonomi, tetapi juga secara mikro yaitu persaingan semakin ketat antar perusahaan, antar manajemen bahkan antar pekerja sendiri dalam tataran lokal, regional, nasional dan global. Tuntutan pengembangan profesionalisme dan etos kerja secara terus menerus bagi pelipat gandaan produktivitas kerja dan kinerja organisasi akan menjadi syarat yang sangat diperlukan bagi kelangsungan dunia usaha. Jika tidak dilakukan, maka kemungkinan perusahaan akan tergilas dalam persaingan yang ketat tersebut.

Perbaikan dalam kualitas tenaga kerja manusia tersebut akan dapat mendorong tenaga kerja untuk dapat memilih lapangan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya, bahkan lapangan pekerjaan yang mendapatkan imbalan yang wajar dan kesempatan pengembangan karier lebih lanjut.

Berbagai permasalahan yang berakibat menurunnya daya saing perusahaan yang bersumberkan pada tenaga kerja adalah:

- Rendahnya tingkat pendidikan dan tidak relevannya pengetahuan dan keahlian, yang berimplikasi kepada produktivitas kerja.
- Peraturan ketenagakerjaan lebih menimbulkan masalah dibandingkan kualitas pekerja, diantaranya mencakup tatacara pemberhentian dan pemberian

uang pesangon, keterbatasan dalam mempekerjakan pekerja sementara, dan peraturan pengupahan yang kaku.

- Maraknya serikat pekerja yang satu sama lainnya tidak bersinergis.

Trikarsa sebagai upaya strategis

Paradigma pemahaman pembangunan ekonomi saat ini harus berbasis kepada konsep: nasionalisme dan kerakyatan, daya saing dan rasa keadilan yang didukung oleh sumberdaya manusia yang pandai, tangguh, berintegritas dan bermoral, serta berpandangan luas dan jauh kedepan. Mengingat berbagai konsep dan langkah telah banyak dibuat dan telah dilaksanakan, namun hasil yang diperoleh ternyata jauh dari harapan, terjadi ketimpangan ekonomi, ketimpangan sosial, arogansi politik, konflik sosial, keterbatasan infrastruktur, maka perlu upaya pendekatan dengan langkah yang dramatik dan strategik yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen untuk percepatan pembangunan.

Mengingat berbagai masalah yang ada sekarang ini sudah begitu rumit dan seluruh pihak yang berkaitan dengan pelaksana pembangunan sektor ekonomi sebagian besar telah berbuat KKN, juga perilaku masyarakat sudah sangat konsumtif, maka saya mengusulkan agar kita kembali kepada aspek-aspek yang fundamental sesuai dengan undang-undang dasar 1945 yang murni dan cita -cita para pendiri bangsa dan negara.

Sebagai kata kunci untuk menyelamatkan masalah Bangsa dan Negara, adalah dengan ***trikarsa*** sebagai berikut :

1) Menumbuhkan kesadaran dan kemandirian bangsa melalui gerakan swadiri dan swadesi yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan UMKM dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak,dalam upaya peningkatan daya beli masyarakat guna penciptaan kemandirian dan ketangguhan ekonom nasional.

2) Peningkatan integritas, moralitas dan profesionalisme aparatur dan kepemimpinan bangsa dalam peningkatan pelayanan publik dengan mengutamakan ketertiban, keadilan, kesejahteraan dan kecerdasan rakyat dalam rangka keutuhan NKRI.

3) Perwujudan demokratisasi dan otonomi daerah, serta penegakan dan kepastian hukum yang konsekwen dan konsisten, disertai dengan percepatan pemberantasan KKN secara menyeluruh dalam perwujudan nilai-nilai budaya yang luhur.

Adapun langkah-langkah fundamental yang harus menjadi prioritas, antara lain:

a) Reformasi regulasi, kelembagaan dan aparatur dalam peningkatan daya saing investasi, untuk:
    - Menjaga dan mempertahankan investasi yang telah ada selama ini.
    - Mengambil tindakan terhadap penyimpangan yang terjadi di birokrasi dan pasar.

- Merumuskan rencana strategi dan tindakan rencana jangka menengah yang komprehensif untuk perbaikan investasi.

b) Reformasi ketenaga-kerjaan dan hubungan industrial berbasis Pancasila

c) Reformasi Pemberantasan Korupsi,Kepastian dan Penegakan Hukum.

Memberantas KKN perlu ”pressure”

Pemberantasan KKN yang saat ini dilakukan oleh pemerintah dengan kelembagaan KPK dan TIPIKOR ternyata hanya berjalan ditempat. Perlu dibangkitkan kesadaran publik agar terbentuk *pressure group* pemberantasan KKN. Seluruh kekuatan yang ada di masyarakat harus mampu menghimpun diri dalam sebuah *”platform”* yang bersinergi, misal Forum Rektor, *Government Watch, Coruption Watch,* ISEI, KADIN, LBH, Barasetra, dan lain-lainnya. Unsur-unsur masyarakat ini harus bersedia dikoordinasi oleh lembaga lain semisal BARNAS.

Kekuatan *pressure group* ini mendapat informasi secara transparan dan akuntabilitas publik, kemudian mendorong pemerintah dan pemimpin nasional agar memiliki kemauan dan keberanian politik untuk memberantas KKN dan menghentikan hutang. Saya percaya dengan moral, keikhlasan dan perjuangan gigih dari *pressure group* ini, maka KKN akan dapat diberantas.

5

KEPEMIMPINAN YANG DIHARAPKAN

NKRI, Pancasila dan UUD ‘45

Satu kesatuan jatidiri

Sebagai pejoang ’45, saya berpendapat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila dan UUD ’45 adalah satu kesatuan jatidiri yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pancasila sebagai falsafah bangsa merupakan roh dari UUD ’45 yang merupakan hukum dasar NKRI. Cita-cita luhur bangsa Indonesia terpampang jelas dalam pembukaan UUD ’45. Pancasila dan UUD ’45 merupakan kristalisasi harkat bangsa Indonesia.

Kegagalan para pemimpin terdahulu karena mereka tidak pernah melaksanakan Pancasila dan UUD ’45 secara benar dan konsekwen. Apakah sulit melaksanakan UUD ’45 secara benar dan konsekwen? Saya merasa tidak sulit kalau para pemimpinnya mau dan memiliki “political will” yang kuat dalam cita-cita menyejahterakan rakyatnya. Para pemimpin harus bersedia hidup sederhana, tidak melakukan KKN, menjadi tauladan bagi rakyatnya, dan pemerintahannya harus *“clean and capable government”* berbasis swadaya dan swadesi.

Reformasi kebablasan

Fakta hingga saat ini, selama 60 tahun Indonesia merdeka, masih ada kelompok yang tidak setia kepada NKRI, Pancasila dan UUD ’45. Banyak hal merisaukan yang harus direnungkan dan segera dicari jalan keluar penyelesaiannya secara bersama-sama, antara lain yaitu:

- Konflik dan gejala disintegrasi masih terus terjadi hingga saat ini di Indonesia. Bahkan kalau kita lengah, konflik dan gejala disintegrasi ini bisa memasuki tahap kritis yang dapat mengakibatkan pecahnya NKRI.

- Kemiskinan dan pengangguran belum teratasi. Hutang negara semakin menumpuk menuju kebangkrutan bangsa, karena telah mencapai 52% dari PDRB.

- Di lain pihak, korupsi masih terus merajalela (halal-haram-hantam-habis) dan akibatnya Indonesia

menjadi negara yang paling korup di dunia. Ketuhanan Yang Maha Esa berubah menjadi *keuangan yang maha kuasa*.

- Semangat kebersamaan, persatuan, dan nasionalisme luntur. Budaya gotong-royong dirusak oleh globalisasi melalui konsumerisme. Bahkan akibat konspirasi neo-kolonialisme, ada yang mengatakan bahwa Pancasila telah ketinggalan jaman.

- UUD ’45 diamandemen sampai empat kali. Menurut pendapat saya amandemen ini bukan memperbaiki UUD ’45 yang asli, tetapi mengubah UUD ’45 menjadi UUD 2002. Sesungguhnya dengan UUD 2002 ini Republik Proklamasi telah berakhir, dan akan membuat Indonesia Raya tinggal kenangan. Ini adalah reformasi yang kebablasan.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak lagi sebagai wujud kedaulatan rakyat. MPR tidak lagi menyusun Garis-garis Besar Haluan Negara. Kebijakan pembangunan nasional lebih banyak dipengaruhi oleh partai pemenang pemilihan umum. Ini berakibat tidak ada jaminan keberlanjutan.

- Sistem pemerintahan tidak jelas, presidensiil bukan, parlementerpun tidak. Namun yang jelas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari Presiden. Kontrol DPR cenderung menekan dan memeras.

- Ekonomi kekeluargaan cenderung berubah menjadi ekonomi liberal kapitalistik. Peran pemerintah menjadi minim, dan kesejahteraan rakyat semakin sulit diwujudkan.

- Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) harus melalui partai politik dan harus punya uang banyak. Rawan perpecahan dan “money politics”. Kepala Daerah terpilih belum tentu sesuai harapan rakyat.

Kembali ke UUD ’45 secara konsekwen

Saya tidak bermaksud menentang kekuasaan yang ada, tetapi hanya sekedar mengingatkan para pemimpin dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama menata kembali kehidupan berbangsa secara bermartabat, antara lain yaitu:

- Meminta Presiden menggunakan legitimasi untuk kembali kepada UUD ’45 sebelum diamandemen dan melaksanakannya secara konsekwen.
- Me-*review* dan mencabut UU anakan UUD ’45 hasil amandemen.
- Meminta Presiden segera memberantas KKN, mengatasi kemiskinan, pengangguran secara serius.
- Meminta Presiden untuk bertindak tegas menyelesaikan konflik dan gejala disintegrasi secara kearifan lokal.
- Sistem perwakilan dalam pemerintahan hanya akan berjalan dengan baik bila wakil-wakil rakyat benar-benar memperjuangkan aspirasi rakyat secara nyata.

Pemimpin tidak berkualitas

Kita semua maklumi dan telah menjadi rahasia umum, bahwa kepemimpinan nasional generasi sekarang lebih banyak berlandaskan ilmu yang teoritis, kedudukan dan kekuasaan, materi dan uang. Sifatnya egosentris, sektoral, arogan, merasa super, menyepelekan potensi besar kekuatan masyarakat, tidak mau mendengar suara rakyat alias tuli, buta lingkungan. Padahal kepemimpinan nasional yang sangat diharapkan saat ini adalah yang memiliki pandangan kesemestaan, kepemimpinan yang berwibawa karena berjiwa kerakyatan, menyadari bahwa kekuatan rakyat adalah inti, bertekad membangun dan membina pedesaan sebagai prioritas.

Saya sebagai salah seorang pejoang '45 merasa sangat prihatin bahwa setelah merdeka selama 60 tahun sebagian besar rakyat Indonesia masih tetap miskin, bahkan bangsa kita ini semakin terbelakang dibanding dengan bangsa-bangsa lain. Padahal NKRI ini lahir dengan tebusan darah dan air mata para pejoang 45, yang hanya bermodalkan tekad dan semangat tanpa embel-embel rupiah apalagi dolar, telah berhasil menjadikan bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa lain. Situasi dan kondisi bangsa kita yang telah 60 tahun merdeka ini, bukannya semakin kokoh dan mandiri, malah sebaliknya ibarat manusia yang tua renta tanpa daya, sangat rentan oleh permainan global bangsa-bangsa lain.

Sejak terjadinya krisis moneter tahun 1997 yang berkembang menjadi krisis multidimensi, Indonesia mengalami kemandegan yang cenderung semakin memberat. Para pemimpin negara yang silih berganti, tidak mampu membawa Indonesia bangkit dari keterpurukan, mengangkat menjadi setara dengan negara-negara maju.

Gambaran keterpurukan bangsa kurang lebih sebagai berikut:

- Daya Saing Bangsa urutan ke 49 dari 49 negara berkembang.
- Daya Saing Sumber Daya Manusia urutan ke 48 dari 49 negara sedang berkembang.
- Indek Pembangunan Manusia urutan ke 112 dari 177 negara.
- Tingkat Produktivitas urutan terendah ke 2 di Asia setelah Bangladesh.
- Korupsi-Kolusi-Nepotisme urutan ke 6 di dunia, no 2 di Asean.
- Daya Tarik Investasi urutan terakhir di antara negara-negara Asean.

Pemimpin yang mengecewakan

Pada periode kampanye Pemilihan Presiden Secara Langsung tahun 2004, suasana kejenuhan dan stagnan berubah menjadi secercah harapan. Waktu itu Capres dan Cawapres SBY-JK tampil meyakinkan dengan semboyan: Bersama Kita Bisa dan berjanji akan

melakukan terobosan-terobosan demi pembaharuan. Sebanyak 13 juta rakyat Jawa Barat atau sekitar 15% dari seluruh pemilih di Indonesia telah memilih SBY-JK. Rakyat Jawa Barat telah menunjukkan kedewasaannya, mampu mempertahankan keyakinan pilihannya kepada SBY sebagai calon idolanya, ditengah ancaman kekuatan/ kekuasaan, taburan materi, dan lepas dari ikatan pengaruh partai. Akhirnya SBY-JK terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden baru dengan dukungan suara rakyat yang menginginkan pembaharuan. Itulah makna dan hakekat Pilpres secara langsung.

Namun setelah 2 tahun pemerintahan SBY-JK, kembali rakyat Indonesia mendulang kekecewaan. Walaupun dari sisi hukum yang dipantau langsung oleh SBY masih ada harapan, tetapi dari sisi ekonomi yang ditangani oleh JK terasa sangat parah. Tim ekonomi Kabinet SBY-JK disorot tajam oleh masyarakat karena dianggap tidak mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi bangsa ini.

Mengapa kecewa? Fakta tersebut menunjukkan bahwa bangsa kita ini telah menyia-nyiakan makna kemerdekaan, menyia-nyiakan arti kehidupan untuk menjadi bangsa yang besar dan berwibawa. Selama 60 tahun Indonesia merdeka, “leadership” para pemimpin nasional kita tidak berhasil membawa bangsa ini menjadi makmur dan sejahtera, malah yang kita rasakan bangsa ini semakin diombang-ambingkan oleh kekuatan global. Bangsa ini telah kehilangan kebanggaannya, bangsa ini telah kehilangan jatidirinya, bangsa ini telah tercerabut

dari akarnya, bangsa ini telah mengkhianati para pahlawannya, mengkhianati pejoang ‘45 yang telah dengan ikhlas gugur memberikan jiwa dan raganya demi kemerdekaan bangsa.

Kita rasakan bahwa selama ini “leadership” para pemimpin nasional kita tidak pernah secara nyata mengajak rakyat untuk bersama membangun kesemestaan bangsa. Para wakil rakyat yang terpilih-pun tidak membawakan aspirasi rakyat jelata dalam proses pembangunan bangsa. Bahkan banyak wakil rakyat dan birokrat yang pada akhirnya terjebak dalam kegiatan korupsi-kolusi-nepotisme yang amat merugikan bangsa dan negara.

Demikian pula SBY-JK, dalam masa kepemimpinannya selama hampir 2 tahun telah meninggalkan rakyat pemilihnya. Kehebatan dan kedewasaan rakyat Jawa Barat yang seharusnya dipelihara sebagai sumber inspirasi kepemimpinanya, telah ditinggalkan oleh SBY-JK. Aspirasi dan ide-ide hasil pemikiran rakyat pemilihnya yang disusun oleh Tim “Think Tank” pembela rakyat tidak dimanfaatkan. Justru terbawa oleh pemikiran-pemikiran global yang tidak merakyat. Bahkan kedewasaan rakyat ini telah dihancurkan kembali oleh praktek elite partai yang tidak edukatif dalam sistem dan proses PILKADA.

SBY-JK telah kehilangan sense of psichology untuk mendapat dukungan rakyat. SBY-JK lupa bahwa mereka adalah Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat langsung. Kepemimpinannya dirasa tidak ke arah

membangun home front kesejahteraan rakyat kecil. Bahwa alasan banyak terjadi bencana alam dan pengaruh turbulensi **pasar global** bisa dimaklumi, bahwa telah diambil kebijakan yang tidak populis juga bisa dimaklumi. Strateginya bisa saja benar, tetapi pelaksanaan di lapangan **very poor**. Sebagai contoh kenaikan harga BBM yang tidak diawali persiapan dan upaya yang memadai: tidak menyiapkan bahan bakar alternatif, sosialisasi tidak efektif, para penyelundup dan penyeleweng tidak ditangkap terlebih dahulu, malah seterusnya membagi-bagi uang secara langsung yang tidak mendidik, bahkan membunuh kreativitas rakyat.

Pemimpin adalah panutan

Lalu apa upaya? Kita tidak cukup hanya bicara sana-sini, seminar sana-sini, diskusi sana-sini. Kita tidak bisa hanya mengeluh, kita tidak bisa hanya berpangku tangan menunggu dan menunggu belas kasihan dari orang lain. Rakyat keburu semakin sengsara, bila tidak ada gerakan yang "prak" langsung di lapangan dan bisa dinikmati masyarakat yang membutuhkan. Bukan model "mie instant", tetapi berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan dikerjakan bersama rakyat. Tindak nyatanya adalah: back to basic, yaitu pemerintahan dengan semboyan: *Bersama Kita Bisa* dengan terobosan-terobosan demi pembaharuan untuk menyelamatkan dan membangun NKRI dan kesejahteraan rakyat. Saya tetap mempertahankan SBY-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tetapi saya akan selalu mengingatkan dan menuntut agar SBY-JK menggunakan kekuatan

rakyatnya untuk kemandirian bangsa. Jajaran pembantunya harus mempunyai kualifikasi: pakar, fighter, pengabdi rakyat dan tidak terikat ke-partai-an. Sebagai pengawas, kita bangun pressure people's power di Pusat dan Daerah untuk meng-audit secara kritis dan korektif agar pemerintahan SBY-JK tidak keluar dari rel. Saya menekankan bahwa gerakan pressure ini harus berbasis kearifan lokal, keberdayaan dan kemandirian, bersama rakyat secara kesemestaan untuk secara tabah dan kreatif membangun dirinya sendiri, kelompoknya, desanya, wilayahnya, bangsanya. Bersikap kritis korektif terhadap penyelewengan-penyelewengan khususnya yang dilakukan oleh birokrasi yang berdampak terhadap merosotnya lingkungan hidup.

Kita harus melaksanakan swadaya dan swadesi, yaitu gerakan kreatif dan mandiri mampu berdiri di atas kaki sendiri. Kreatif menciptakan produk dalam negeri dengan komponen lokal, meningkatkan mutu produk dalam negeri untuk mampu bersaing dengan barang luar negeri baik dipasar lokal, nasional maupun global.

- Ciptakan produk-produk dalam negeri, baik produk manufaktur maupun produk agro, menjadi primadona global.
- Upayakan agar mangga arumanis kita mampu bersaing dengan apel luar negeri
- Upayakan agar oli Mesran kita mampu bersaing dengan Top 1 buatan Amerika.
- Jangan "luar negeri minded"! Rebut kembali pasar lokal kita untuk produk dalam negeri, bukan didominasi oleh produk luar negeri.

- Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kehormatan dan menyintai kebanggaan diri, kita harus mendahulukan penggunaan produk bangsa sendiri.

Para Pemimpin harus melaksanakan dan meneladani gaya hidup sederhana, memberi contoh kepada seluruh warga bangsa untuk tidak berperilaku konsumtif. Hilangkan perilaku yang menimbulkan kecemburuan sosial. Mereka yang "luar negeri minded" dan selalu membanggakan produk luar negeri dan bergaya hidup mewah dan konsumtif harus dicap: a-nasionalis, tidak memiliki jiwa nasional. Mereka adalah termasuk pengkhianat bangsa, "pembunuh" produk bangsa sendiri.

Tumbuhkan perasaan *sense of crisis* di benak seluruh warga bangsa, terutama tingkat pimpinan yang harus sepenuhnya meyakini bahwa bangsa dan negara kita sedang mengalami krisis yang berbahaya. Dirikan Pos *Crisis Center* untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Himbau kepada mereka yang "berlebih" untuk "sukarela" menyumbangkan sebagian rejekinya melalui Pos *Crisis Center* ini untuk diteruskan kepada rakyat yang sengsara dan sangat membutuhkan bantuan.

Batalkan kebijakan publik yang kontra produktif dan menimbulkan konflik, misal pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, pembangunan dengan dana hutang yang tidak wajar, kegiatan yang mengalihkan barang publik menjadi barang swasta, dan lain-lain yang sejenis.

Pecat pejabat, baik tingkat menteri maupun tingkat lokal, yang melakukan KKN dan tidak memiliki kemampuan. Ganti pejabat, baik tingkat menteri maupun tingkat lokal, yang tidak memiliki basis kerakyatan. Pejabat setingkat menteri harus akrab dengan rakyat dengan pola kebijaksanaan mengacu kepada kekuatan rakyat dan perekonomian rakyat. Manfaatkan tenaga kerja dan sarjana generasi muda yang potensial untuk memulai regenerasi bangsa.

Pulihkan kelestarian lingkungan hidup Indonesia secara seksama dan semesta bersama rakyat, berbasis kearifan lokal, daerah aliran sungai, kawasan lindung, hutan tropika untuk menjamin kesinambungan pembangunan bangsa. Setiap pembangunan yang dinilai akan merusak lingkungan harus ditinjau kembali atau dibatalkan.

Bentuk *"think tank"* tindak nyata langsung untuk kesejahteraan rakyat, bukan "think tank" yang sekedar berteori dan berwacana yang tidak bisa diaplikasikan. Ciptakan ketahanan nasional, daya tahan nasional, perekonomian rakyat yang tangguh terhadap ancaman ekonomi global yang sangat turbulen. Tekankan inti cita-cita bangsa, yaitu rakyat yang sejahtera, negara kesatuan yang "Bhineka Tunggal Ika", menjadi bangsa yang berwibawa setara dengan bangsa lain yang telah maju berkembang.

Pemimpin dan regenerasi

Sebuah negara akan memperoleh kegemilangan karena memiliki pemimpin yang berwawasan dan visi masa

depan, disamping berpegang serta berpedoman pada prinsip dan nilai-nilai murni untuk kesejahteraan rakyatnya.

Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah milik perseorangan atau kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin yang saat ini berkuasa adalah hasil pilihan rakyat yang diharapkan mampu mengabdi untuk kepentingan nasional.

Setiap pengabdian pasti ada masa akhirnya. Kunci sukses seorang pemimpin adalah ketika dia mampu menciptakan kader penerus, menciptakan satu generasi pemimpin baru yang akan menggantikan posisinya. Pemimpin yang tidak mau melakukan regenerasi adalah pemimpin yang takut kehilangan nikmatnya berkuasa.

Pemimpin dari generasi penerus ini minimal harus memiliki kualitas dan kapabilitas yang sama dengan kepemimpinan yang lama, bahkan seharusnya lebih baik lagi. Sangat ironis bila ada kepemimpinan yang tidak mampu menciptakan kader atau generasi pemimpin selanjutnya. Itu berarti dia gagal menampilkan sebuah kepemimpinan yang baik, dan gagal dalam memimpin bangsa.

Jadi, seorang pemimpin seharusnya memiliki sifat kepemimpinan yang bijak. Dia harus *legowo* kalau rekananya atau kadernya ingin mengembangkan diri demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Logikanya, bila kadernya sukses berarti sang pemimpin tadi juga sukses. Artinya, sang pemimpin sukses menciptakan

kader yang juga mampu meneruskan dan mengembangkan cita-cita bangsa. Sebaliknya kader tadi seharusnya tidak akan melupakan jasa sang pemimpin sebelumnya yang sukses dalam membentuk regenerasi.

Regenerasi kepemimpinan merupakan hal esensial bagi keberlanjutan bangsa dan negara. Sulit membayangkan sebuah bangsa bisa terus eksis jika tidak bertumbuh semangat untuk memberi tempat kepada generasi muda guna melanjutkan estafet kepemimpinan.

Sesungguhnya regenerasi kepemimpinan adalah sebuah kemestian bagi setiap negara dan bangsa, apapun ideologinya. Berilah kesempatan bagi generasi muda untuk tampil dan memberi kontribusi lebih banyak lagi kepada negara dan bangsa. Dengan penyiapan regenerasi, maka akan terjadi penyiapan pemimpin ke masa depan yang tangguh mengabdi kepada negara dan bangsa.

Pemimpin dan konsep bela negara

UUD 1945 Pasal 30 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Hakekat bela negara adalah segala upaya, tekad, sikap dan tindakan setiap warga negara secara semesta, teratur, menyeluruh, terpadu dalam rangka penyelenggaraan pertahanan keamanan negara yang dilandasi oleh kesadaran atas hak dan kewajiban sebagai warga negara, kecintaan pada tanah air, serta keyakinan atas kekuatan sendiri.

Negara Indonesia ini bukan milik perseorangan atau miliki kelompok tertentu, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, pemimpin yang baik dan berkualitas adalah pemimpin yang mampu sebagai panutan dan mengajak seluruh rakyat Indonesia memenuhi hak dan kewajibannya untuk membela keutuhan NKRI. Rakyat Indonesia adalah sumber kekuatan bangsa yang menjadi kekuatan dasar upaya pertahanan keamanan negara.

Mau tidak mau, konsep bela negara ini adalah wajib latih bagi setiap warga negara dalam rangka menyiapkan diri memehuhi hak dan kewajibannya untuk membela negara. Pada tanggal 4 Februari 1948 di depan sidang Badan Pekerja KNIP, Wakil Presiden Hatta menyatakan bahwa pemerintah akan menyiapkan dasar-dasar untuk menjadikan tentara kita jadi tentara milisi. Tentara milisi lebih baik daripada *tentara upahan*, karena milisi menanam rasa kewajiban dan tanggung jawab.

Jenderal Nasution pernah mengemukakan bahwa pada pokoknya ada dua sistem tentara, yakni *tentara upahan* dan *tentara rakyat*. Dalam sistem *tentara upahan*, pada hakekatnya prajurit memanggul senjata atas dasar upah, sedangkan dalam sistem *tentara rakyat*, prajurit-prajurit adalah putra rakyat sendiri yang dikerahkan memanggul senjata karena negara berada dalam bahaya, bukan karena ia diupah.

Tentara rakyat adalah barisan warganegara sipil yang telah dilatih dan mepunyai kemampuan militer, tapi tidak berprofesi tetap sebagai tentara. Kalau negara dalam

keadaan bahaya, mereka siap dipanggil ke dinas aktif militer. Bila terjadi bencana alam atau sejenisnya, bisa saja mereka dikerahkan untuk menanggulangi bencana dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Mereka dibedakan dari tentara reguler yang berprofesi sebagai militer, yang makan gaji dan tunjangan pensiun dari negara.

Wajib latih dan wajib dinas militer untuk menjadi tentara rakyat dalam rangka bela negara adalah dalam rangka merealisasikan bahwa tentara adalah rakyat, dan rakyat adalah tentara. Keberadaan tentara rakyat dalam angkatan perang adalah untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya dominasi militer atau "kasta militer”. Ketiadaan tentara rakyat akan menjadikan tentara reguler sebagai “kasta militer”. Contoh baik negara-negara yang telah melaksanakan wajib latih dan wajib dinas militer adalah Singapura, Swiss, dan Israel.

Jangan sampai terjadi *salah kaprah* seperti yang diinginkan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1964 yang lalu. PKI mendesak agar mempersenjatai buruh dan tani dan menjadikannya "angkatan ke-5", sejajar dengan angkatan-angkatan bersenjata yang telah ada. *Salah kaprah* yang tidak boleh terulang kembali.

Konsep tentara rakyat atau lebih *keren* disebut *citizen army* adalah terjemahan dari kedaulatan rakyat dalam membela negara. Dalam kesehariannya, keserasian hubungan sipil-militer terjalin jika dalam angkatan perang terdapat tentara rakyat yang terlatih yang berjuang bahu membahu bersama tentara reguler.

Namun demikian, dari fakta yang ada sampai sekarang, walaupun oleh UUD 1945, Konstitusi RIS maupun UUDS 1950, juga oleh undang-undang pokok pertahanan yang pernah diterbitkan (1948, 1954, 1982, 2002), pelaksanaan milisi berupa bala cadangan, wajib latih, rakyat terlatih, mobilisasi masih belum terlaksana sepenuh hati. Tentara adalah rakyat dan rakyat adalah tentara, Siliwangi adalah rakyat dan rakyat adalah Siliwangi, masih kabur pelaksanaannya. Sekali lagi saya mengingatkan kepada pemimpin bangsa ini, agar konsep bela negara dan tentara rakyat untuk dapat segera direalisasikan demi memiliki generasi muda yang tangguh, kuat fisiknya, disiplin, berorientasi kepada rakyat, siap membela negara setiap saat, dan yang penting lagi bahwa konsep ini murah.

Pemimpin dan kemandirian anggaran

Kemandirian APBN/ APBD harus ditegakkan dengan menggali sumber dalam negeri sendiri, antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan dan bea cukai. Pembentukan institusi Perpajakan dan Bea Cukai yang mandiri, terpisah dari Departemen Keuangan. Dalam kurun waktu awal, kita harus puasa dulu dengan konsep swadaya dan swadesi. Tutup “keran” hutang dan upayakan pembangunan berdikari secara kreatif. Hentikan budaya utang dan “ngagandol” kepada bangsa lain. Upayakan pemangkasan hutang luar negeri dengan cara-cara yang elegan dan tidak merendahkan martabat bangsa. Berantas ekonomi “gelap” (penyelundupan dan

sejenisnya). Untuk ini semua perlu diterbitkan undang-undang Swadesi dalam rangka kemandirian bangsa.

Reformasi perpajakan dan bea cukai ini harus merupakan agenda prioritas nasional sebagai tindak nyata menciptakan kemandirian keuangan bangsa. Beberapa waktu lalu sebuah media cetak menurunkan berita utama yang isinya menyebutkan bahwa potensi kehilangan pajak yang terjadi selama kurun 2002-2004 akibat adanya aturan perundang-undangan perpajakan yang tumpang tindih dan minimnya akses Direktorat Jenderal Pajak terhadap data-data kekayaan wajib pajak di Indonesia mencapai Rp 676,5 triliun.

Pengungkapan adanya potensi kehilangan pajak itu hanyalah menunjukkan kelemahan pemerintah kita selama ini. Selain lemahnya sistem administrasi dan koordinasi, kita melihat ketidakmampuan aparat pajak dalam melaksanakan tugas mengumpulkan penerimaan negara. Padahal, kita sadar bahwa pajak itu merupakan andalan bagi bangsa ini untuk bisa melakukan pembangunan. Bahkan mulai tahun 2005 dan selanjutnya, itulah satu-satunya sumber penerimaan negara karena tidak ada lagi pemasukan yang bisa diperoleh dari penjualan aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Kecuali kalau kita masih mau melakukan privatisasi, menjual aset yang dimiliki badan usaha milik negara.

Bahkan, berdasar analisis beberapa ahli dan praktisi, angka potensi pajak yang berkisar Rp 600 trilyunan tersebut dapat diraih pada tahun 2006, asal pemerintah

berani melakukan reformasi perpajakan, yaitu dengan meningkatkan *tax ratio* dari 13,1% menjadi 17,0%, *tax coverage* dari 76,4% menjadi 95,0%, dan *tax complience* dari 41,4% menjadi 70,0%. Menaikkan angka *tax ratio* sampai 17,0% masih termasuk wajar dan logis, karena Srilangka-pun menentukan *tax ratio*-nya sebesar 17,91%.

Dalam 100 hari awal kerjanya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun telah pula menekankan kepada Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai - Departemen Keuangan untuk mengoptimalkan sejumlah langkah-langkah, baik dalam penerimaan negara maupun dalam upaya menekan sekecil-kecilnya kebocoran penerimaan negara dari sisi pajak, bea masuk dan cukai. Hal ini mengingat kedua Ditjen tersebut merupakan andalan utama untuk menopang anggaran negara di masa mendatang dalam konsep kemandirian anggaran pendapatan negara.

Kemudian institusi Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menanggapi akan mencoba melakukan perbaikan kinerjanya, antara lain dengan akan memberlakukan *tax amnesty*, konsep perpajakan dengan menggunakan *e-system* dengan mengupayakan *single identity number*.

Namun demikian, ternyata berdasar hasil diskusi dan dialog yang berlanjut diantara para ahli dan praktisi, terungkap bahwa semua analisis dan upaya tersebut di atas dikatakan masih merupakan upaya teknis. Terungkap masih ada akar masalah yang substansial

yang harus diupayakan sebagai terobosan dalam rangka kemandirian pendapatan anggaran negara. Upaya terobosan ini mengusulkan reformasi perpajakan secara total, yaitu menjadikan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi sebuah institusi yang berada langsung di bawah Presiden, berupa Departemen atau Badan yang terpisah dari Departemen Keuangan, yang mandiri sebagai institusi penerimaan keuangan negara. Untuk itulah saya menghimbau kepada para pakar, akademisi untuk ikut mendorong terbentuknya institusi perpajakan dan bea cukai yang mandiri.

6

PENUTUP

Kerusakan lingkungan akan menyebabkan “amukan” alam menjadi bencana yang menyengsarakan rakyat dan membawa negara kepada kehancuran. Kerusakan lingkungan adalah karena mis-manajemen sumber daya alam yang dilakukan oleh para pimpinan bangsa. Dalam hal kerusakan lingkungan, jangan menyalahkan rakyat kecil, karena kesalahan pasti ada di pimpinan. Perangi setiap perusak lingkungan. Pemulihan lingkungan hidup hanya akan berhasil bila dilakukan bersama rakyat secara kesemestaan.

Membangun kembali pedesaan dengan ekonomi kerakyatan berbasis kearifan lokal merupakan konsep “back to basic” untuk mengangkat derajat rakyat dan kemandirian bangsa.

Budaya konsumtif, korupsi dan KKN hanya bisa diberantas dengan cara “pressure” oleh segenap lapisan masyarakat yang memiliki “platform” dan bersinergi

memberikan dorongan kepada pemerintah agar memiliki kemauan dan keberanian politik.

Pemimpin nasional yang diharapkan adalah yang mampu menggugah semangat bela negara keutuhan NKRI, kembali melaksanakan Pancasila dan UUD ’45. Selain itu pemimpin nasional harus berkualitas, tidak mengecewakan rakyat, bergaya hidup sederhana, dan memiliki konsep kemandirian anggaran.

Demikianlah Saudara-saudara yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan tadi akan dapat menjadi bahan acuan para pemimpin rakyat, terutama generasi muda dalam menyikapi situasi kritis bangsa.

Semoga Allah SWT memberikan bimbingan, karunia dan kekuatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf bila ada kekhilafan kata dan tulis, karena Allah SWT lah Yang Maha Benar. Amiiin.

PUSTAKA

Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), 2004, *Ulasan Kritis Lingkungan Hidup Jawa Barat Tahun 2003*, bahan ekspose di Gedung DPRD Propinsi Jawa Barat, 28 Februari 2004.

Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), 2004, *Membangun Kembali Iklim Mikro untuk Menegakkan Peran Global Nusantara*, Dialog dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Bandung 2 November 2004.

Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), 2004, *Kondisi Hutan dan Lingkungan Kita serta Solusi Pemecahannya*, Dialog dengan Menteri Kehutanan, Jakarta 4 November 2004.

Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), 2004, *Reformasi Perpajakan*, Dialog dengan Menteri Keuangan, Jakarta 6 November 2004.

Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), 2005, *Menuju Pengelolaan DAS secara Utuh dan Terpadu*, Dialog dengan Menteri Pekerjaan Umum, Jakarta 28 April 2005.

Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), 2006, *Infrastruktur Alam sebagai Basis Pembangunan Berkelanjutan*, Dialog dengan Menteri PPN/ Kepala BAPPENAS, Jakarta 9 Februari 2006.

Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), 2005, *Lingkungan Jawa Barat dan Paket Pedesaan*, Dialog dengan Gubernur Jawa Barat, Bandung 21 Februari 2005.

Mubiar Purwasasmita, 2006, *Olah Lahan Sebagai Bioreaktor: Studi Kasus SRI (System of Rice Intensification),* Simposium Riset Teknologi Pertanian, Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia, Jakarta 12 Juli 2006.

Sidik Priadana, 2006, *Benarkah dan Efektifkah Arah Pembangunan Ekonomi Kita?*, Dialog Interaktif Barisan Nasional (BARNAS), Jakarta Mei 2006.

Sobirin, 2006, *Kinerja Penataan Ruang Jawa Barat dan Dampaknya terhadap Sumber Daya Air,* Seminar Nasional Teknik Sumber Daya Air, UNPAR, ITENAS, UNJANI, HATHI, PUSAIR, Bandung 23-24 Juni 2006

BIODATA SINGKAT

Nama : Solihin Gautama Purwanegara
Lahir : Tasikmalaya, 21-7-1926
Istri : Mariam Harmain (Tasik, 20-8-1929)

Anak : 1. Jessy Jasmini
2. Jani Elita Haryani
3. Satrija Kamal
4. Moh. Lufti Adimulya

Pendidikan : ELS
MULO 2 Tahun
SMP
SMT
SSKAD (1954)
US Army Inf. School (1957)
SESKOAD (1969)

Pangkat :

Kapten	1-5-1951 s/d 6-12-1956
Mayor	24-6-1956 s/d 5-5-1959
Let. Kolonel	1-1-1959 s/d 20-7-1959
Kolonel	1-10-1962
Brig. Jenderal	1-7-1965
May. Jenderal	1-5-1968
Let. Jenderal	1-2-1978

Jabatan :

1. Angg. BKR, 17-8-1945 s/d 1-12-1945, Bogor, Siliwangi
2. Kmd. Sie. Res. TKR, 1-12-1945 s/d 1-1-1947, Bogor, Siliwangi

3. Kmd. Kie. Trip, 1-1-1947, Bogor, Siliwangi
4. Kmd. Kie.I Bn.II Bc.17, Bogor, Silwangi
5. Kmd. Kie.V Bn. Tengkorak Bc.13, 19-12-1948 s/d 10-8-1949, Bogor, Siliwangi
6. Kmd. Staf Ko. Kmd.III, 10-8-1949 s/d 1-5-1951, Bogor, Siliwangi
7. Kmd. Bn. 204. TT. Bangka, 1-5-51 s/d 16-2-52, Bangka, Siliwangi
8. Siswa SSKAD, 16-2-1953 s/d 8-6-1954, Bandung, Siliwangi
9. Guru SSKAD, 8-6-1954`s/d 7-12-1956, Bandung, Siliwangi
10. Pendidikan di USA, 7-12-1956 s/d 1-!0-1957, Amerika Serikat, Siliwangi
11. Ka. SG.II T.T.III, 1-10-1957 s/d 31-12-1957, Bandung, Siliwangi
12. As.II Skodam VI, 1-10-1959, Bandung, Siliwangi
13. Wakas. Dam VI, 1-7-1963, Bandung, Siliwangi
14. Dan. Rin. Dam VI, 1-1-1964, Bandung, Siliwangi
15. Kep. Staf Op. Kilat Dam XIV Hasanuddin, 1964 s/d 1965, Makassar, Hasanuddin
16. Pangdam XIV Hasanuddin, 1-7-1965 s/d 15-7-1968, Makassar, Hasanuddin
17. Gub. AKABRI UDARAT, 15-7-1968 s/d 8-2-1970, Magelang, Hankam
18. Gubernur Jawa Barat, 14-2-1970 s/d 14-2-1975, Bandung
19. SESDALOPBANG, 1977 s/d 1992, Bina Graha, Jakarta, KOKAR 02
20. Anggota DPA, 1992-1997
21. Anggota MPR, 1998

Penugasan :

1. 1959-1960, Tapanuli T.F. Siliwangi, Sumatera Utara
2. 1960-1961, Kongo, GARUDA II, Kongo
3. 1961, Minahasa/ Gorontalo T.F. 330, Sulawesi Utara
4. 1961-1962, Operasi BRATAYUDA, Jawa Barat
5. 1963-1964, Kongo, GARUDA III, Kongo
6. 1964-1965, Operasi Kilat Kodam XIV Hasanuddin, Sulawesi Selatan

Tanda Jasa:

1. Bintang Jasa Tingkat II
2. Bintang Dharma
3. Bintang Gerilya
4. Bintang Ekapaksi Kls IV
5. Medali Sewindu Angkatan Perang
6. Satya Lencana Kesetyaan ke XVI Tahun
7. Satya Lencana Perang Kemerdekaan I
8. Satya Lencana Perang Kemerdekaan II
9. GOM I
10. GOM II
11. GOM IV
12. GOM V
13. Satya Lencana Sapta Marga
14. Penghargaan Op. Tempur Sulawesi (Kahar Muzakar)
15. Satya Lencana Dwijasista
16. Satya Lencana Penegak
17. Bintang Kongo
18. Bintang Bhayangkara Klas II
19. Bintang Swa Buana Paksa

20. Bintang Jalasena Nararia
21. Heung In (Korea Selatan)
22. Bintang Mahaputra Utama
23. Satya Lencana Kesetiaan XXIV Tahun

Keanggotaan :

1. Perkumpulan Penggemar Mobil Kuno Indonesia (PPMKI)
2. Perkumpulan Silat Merpati Putih
3. Barisan Nasional (BARNAS)
4. Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS)
5. Barisan Rakyat Sejahtera (BARASETRA)